



REPUBLIC INDONESIA
SURVEI MONITORING KRISIS GLOBAL FEBRUARI 2010

I. PENGENALAN TEMPAT	
Provinsi	DIY
Kabupaten	Alamendah (Nusa Jatin, Gang, RT 1000)
Kelurahan	a. Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)
Kode Pos	b. Jenis Kelamin KRT
No. Sud Blok Servis	11. Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
Kode Samping Sakernas	12. Jumlah ART Berumur 10 Tahun Keatas
	13. Jumlah Perempuan
	14. Nama Responden dan Kode Hubungan (Responden dgn KRT)**

II. KETERANGAN PETUGAS

III. KETERANGAN

RINCIAN (1) - (10) ADALAH KETERANGAN

(1) a. Apakah kegiatan KRT:
1. Berkarya?
2. Mengurus rumah tangga?
3. Melakukan kegiatan produktif?
4. Melakukan kegiatan produktif lainnya?
b. Dan kegiatan 1-4 di atas apakah:
Jika R(1) a:
(2) Apakah KRT 1-4?
(3) Apakah KRT 1-4?
(4) Apakah KRT 1-4?



Bertahan di Tengah Krisis Global

Ringkasan Studi Kualitatif dan Kuantitatif
Dampak Krisis Ekonomi Global pada
Rumah Tangga di Indonesia (2009 - 2010)



KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK

Bertahan di Tengah Krisis Global

Ringkasan Studi Kualitatif dan Kuantitatif Dampak Krisis Ekonomi Global pada Rumah Tangga di Indonesia (2009-2010)

*Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan
Badan Pusat Statistik (BPS)*

*Bekerjasama dengan: AusAID, Bank Dunia dan
Lembaga Penelitian SMERU*

Jakarta, Oktober 2010



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

LEMBAGA PENELITIAN
SMERU
RESEARCH INSTITUTE

Laporan ini disusun sebagai hasil kerjasama Tim Monitoring dan Respon Dampak Krisis Keuangan Global Bappenas dan BPS didukung oleh *Poverty Group* dari tim *Poverty Reduction and Economic Management* Bank Dunia Jakarta dan oleh Lembaga Penelitian SMERU.

Tim Monitoring dan Respon Dampak Krisis Keuangan Global Bappenas: Bambang Widianto, Prasetijono Wijdojo, Dedi M. Masykur Riyadi, Endah Murniningtyas, Dadang Solihin, Vivi Yulaswati.

Tim BPS: Arizal Ahnaf, Wynandin Imawan, Happy Hardjo, Wendy Hartanto dan Hamonangan Ritonga.

Tim Bank Dunia: Ririn Purnamasari dan Matthew Wai-Poi, dengan Michael Colledge sebagai analis utama dengan dukungan dari Taufik Hidayat dan manajemen proyek oleh Luc Spyckerelle, dan diawasi oleh *Task Team Leader Poverty Group* Vivi Alatas.

Tim Lembaga Penelitian SMERU: Widjajanti I Soeharyo (Wakil Direktur). Kegiatan pemantauan berita dilaksanakan oleh Hariyanti Sadaly, Nur Aini, Ratna Dewi dan Justin Sodo. Pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh Rachma Indah Nurbani, Rizki Fillaili, Bambang Soelaksono, Herry Widjanarko, Nur Aini, Nina Toyamah dan Sri Budiyati. Studi-studi kasus dilaksanakan oleh Hastuti, Syaikhu Usman, Justin Sodo, Deswanto Marbun dan Sulton Mawardi

Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Laporan didukung oleh bantuan Australia (AusAID).

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi ditpk@bappenas.go.id, valatas@worldbank.org dan anti@smeru.or.id.

Kata Pengantar

Assalamu alaikum, Wr. Wb.

Krisis keuangan global yang terjadi di negara-negara maju pada tahun 2008 dalam perkembangannya turut mempengaruhi kondisi perekonomian berbagai kawasan dan negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, krisis ini merupakan krisis kedua setelah krisis finansial tahun 1997/98. Dengan demikian, Indonesia telah relatif siap dan memiliki berbagai kebijakan dan program yang sudah diterapkan sebagai hasil pembelajaran dari krisis keuangan tahun 1997/98.

Meskipun kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2008 jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis global 1997/98, namun dampak krisis di tingkat makro cukup terlihat dan tercermin pada beberapa indikasi seperti antara lain, jatuhnya nilai berbagai saham sejalan dengan merosotnya indeks saham global dan terjadinya depresiasi rupiah yang sedikit banyak berpengaruh pada kegiatan ekonomi berbagai perusahaan, terutama yang melakukan ekspor dan impor. Dampak ini berakibat pada sedikit menurunnya pertumbuhan ekonomi. Namun Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang hanya dialami oleh (3) tiga negara di dunia pada saat krisis 2008 tersebut.

Selain dampak pada perekonomian makro di atas, Pemerintah mengkhawatirkan pula timbulnya dampak lanjutan pada tingkat rumah tangga, atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Jumlah rumah tangga di Indonesia yang *vulnerable*, atau masuk dalam kategori rumah tangga hampir atau dekat miskin berjumlah 7,7 juta rumah tangga atau 43,8% dari total rumah tangga sasaran (RTS) (BPS, 2008). Dikhawatirkan krisis akan berdampak pada kehidupan masyarakat rentan yang jumlahnya cukup besar ini. Berbagai dampak krisis yang dapat berakibat pada kesejahteraan mereka adalah adanya pemutusan hubungan kerja, pemulangan TKI, berkurangnya pendapatan atau daya beli, gangguan kesehatan, putus sekolah, dan sebagainya.

Sementara dampak krisis keuangan pada perekonomian makro dapat diketahui dari data yang sudah tersedia dengan baik, dampak di tingkat rumah tangga lebih sulit untuk diketahui. Sumber data dan informasi tentang kondisi kerja dan kondisi rumah tangga dapat diketahui dari Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Namun demikian, kedua survey ini tidak cukup kerap untuk dapat mengetahui dinamika dampak krisis yang ditransmisikan secara cepat.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Monitoring Krisis Global (SMKG) yang dilaksanakan tiga putaran selama tahun 2009 hingga awal 2010. Survei cepat (*quick survey*) tersebut, dengan bantuan teknis dari Bank Dunia, dilaksanakan untuk mengetahui dampak krisis terhadap kesejahteraan rumah tangga dan langkah-langkah penyesuaian yang mereka lakukan, untuk dapat mengidentifikasi respon yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Hasil survei kuantitatif ini juga dilengkapi oleh studi kualitatif yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian SMERU. Keseluruhan kegiatan ini didukung pelaksanaannya oleh AusAID.

Hasil pelaksanaan survei tersebut di atas memberikan pembelajaran bagi Indonesia untuk menyusun metoda dan indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dampak dari krisis ekonomi di tingkat rumah tangga. Sehubungan dengan itu, laporan ini akan dapat digunakan sebagai bahan referensi penyusunan "*early warning system*" dampak krisis ekonomi di tingkat rumah tangga. Laporan ini juga memberikan masukan secara langsung penyempurnaan survei sosial ekonomi yang ada agar dapat menangkap dinamika dampak krisis. Selain itu, dapat juga diketahui indikator yang diperlukan untuk mempersiapkan respon melalui program-program yang dinilai dapat membantu masyarakat yang terkena dampak krisis, maupun melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan. Penyusunan Laporan ini merupakan langkah awal menuju terwujudnya sistem monitoring dan respon dampak krisis yang handal dan terpercaya.

Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi terhadap Tim Monitoring dan Respon Dampak Krisis Keuangan Global di Bappenas dan BPS, serta SMERU dan Bank Dunia. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada AusAID atas dukungannya dalam pelaksanaan rangkaian survei cepat ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya Sistem Monitoring dan Respon Dampak Krisis dan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia.

Wassalamu alaikum, Wr. Wb.



Lukita Dinarsyah Tuwo

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Singkatan, Akronim dan Terminologi	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemantauan Dampak Krisis Kuantitatif.....	1
1.3 Pemantauan Dampak Krisis Kualitatif.....	3
1.4 Gabungan antara Pemantauan Kualitatif dan Kuantitatif Dampak Krisis	5
2. Krisis secara Umum	7
2.1 Gambaran Makro tentang Penyebaran Krisis dan Urutan Waktu Krisis	7
2.2 Faktor-Faktor Lain	8
3. Dampak Krisis	13
3.1 Akibat Krisis secara Umum	13
3.2 Dampak terhadap Tenaga Kerja.....	14
3.3 Perekonomian Rumah Tangga.....	22
3.4 Strategi-Strategi Penanggulangan Krisis	28
4. Menuju Pembentukan Suatu Sistem Pemantauan dan Respon Jangka Panjang	33
5. Kesimpulan	35
Daftar Pustaka	37

Singkatan, Akronim dan Terminologi

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CMRS	<i>Crisis Monitoring and Response System</i> , Sistem Pemantauan dan Respon untuk Krisis
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> , Minyak kelapa sawit mentah
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> , Diskusi Kelompok Terarah
Kepala RT	Kepala Rumah Tangga
SMKG	Survei Monitoring Krisis Global
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
TBS	Tandan Buah Segar
TKI	Tenaga Kerja Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Sebagaimana negara-negara lain di dunia, Indonesia juga terkena imbas krisis keuangan global yang barawal di negara-negara maju. Indonesia tidak dapat menghindar, namun melakukan berbagai cara untuk membentengi dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia dan masyarakat Indonesia. Sementara dampak di tingkat makro dapat diketahui dengan relatif mudah dan cepat, dampak krisis keuangan global ke tingkat rumah tangga Indonesia relatif sulit diamati dan diukur. Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas ditugaskan untuk memonitor dampak krisis keuangan global di tingkat rumah tangga dan mencoba mengantisipasi langkah-langkah respon yang diperlukan.

Pada tahun 2009, di awal krisis ekonomi global, Tim Monitoring dan Respon Dampak Krisis di tingkat rumah tangga dibentuk di Bappenas untuk menemukan cara untuk memonitor dampak krisis di tingkat rumah tangga dan menyusun langkah respon yang diperlukan. Untuk itu, Bappenas bersama dengan BPS dan Bank Dunia merancang suatu Sistem Monitoring Krisis Global (SMKG) dan diujicobakan untuk memantau dampak krisis secara kuantitatif melalui survey cepat (*quick survey*). Survey kuantitatif ini didukung dengan informasi kualitatif dari SMERU yang diperoleh melalui pemantauan berita, pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan studi-studi kasus. SMKG diterapkan untuk memantau dan memperoleh data dari lebih dari 14.000 rumah tangga di 471 kabupaten/kota dalam selang waktu tiga bulan. Pemantauan kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan perubahan-perubahan “negatif” pada rumah tangga. Tujuan pemantauan kualitatif adalah untuk memberikan suatu penilaian secara cepat untuk memantau dan mengevaluasi dampak-dampak krisis terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang dampak-dampak dari krisis-krisis ekonomi dan bencana alam, dan bagaimana dampak-dampak tersebut ditransmisikan ke rumah tangga yang rentan, baik pemantauan kuantitatif maupun kualitatif diperlukan. Pemantauan kuantitatif mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang bagaimana krisis mempengaruhi berbagai daerah dan bagaimana hal tersebut berubah dengan waktu. Pemantauan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sejumlah faktor menambah kerumitan pada suatu krisis, dan bagaimana orang menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, sebuah sistem untuk memantau dampak-dampak suatu krisis, dan yang bertujuan untuk memberikan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan tentang mekanisme respon terhadap krisis menggunakan baik pemantauan kuantitatif maupun kualitatif.

Dampak-dampak krisis ekonomi global di Indonesia dari pertengahan tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009 tidak terlalu signifikan, dan pada tahun 2009, baik permintaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri mulai pulih. Ketika krisis ekonomi global terjadi pada kuartal terakhir tahun 2008, industri-industri yang berorientasi pada ekspor merupakan salah satu di antara industri-industri yang terkena pukulan paling keras, baik melalui penurunan permintaan maupun melalui penurunan harga komoditas. Di industri-industri lainnya, dampak krisis semakin terlihat nyata di semester pertama tahun 2009, namun pada kuartal empat tahun 2009, sejumlah sektor menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang jelas. Permintaan dalam negeri yang terkait dengan pemilihan umum anggota

legislatif dan pemilihan umum presiden juga membantu memperlunak dampak krisis untuk sejumlah sektor.

Secara umum, analisis kuantitatif menunjukkan adanya beberapa akibat merugikan yang mungkin dikarenakan oleh krisis ekonomi global antara bulan Mei dan Juli 2009, diikuti dengan sejumlah bukti adanya pemulihan antara bulan September dan November, dan tanpa dampak krisis yang berarti antara bulan November 2009 dan Februari 2010. Kesimpulan umumnya adalah sebagai berikut:

- Dampak krisis ekonomi global pada tingkat partisipasi angkatan kerja kepala rumah tangga nampaknya sangat minim atau tidak ada;
- Krisis sepertinya tidak menyebabkan kenaikan pengangguran untuk kepala rumah tangga. Bahkan, jumlah pengangguran mengalami penurunan selama periode bulan Mei-November 2009;
- Mungkin terdapat sejumlah dampak krisis yang menyebabkan penurunan jam kerja kepala rumah tangga antara bulan Mei dan Agustus 2009, sementara tren pada bulan Agustus sampai dengan November menunjukkan kenaikan yang mungkin merupakan tanda pemulihan. Namun, dengan tidak adanya data tolok ukur per kuartal, keabsahan penafsiran tersebut tidak dapat dipastikan;
- Nampaknya terdapat penurunan secara bertahap dari jumlah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal. Namun hal tersebut mungkin merupakan perwujudan dari tren yang lebih panjang daripada suatu dampak krisis, di mana penciptaan lapangan kerja di sektor formal tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan angkatan kerja, dan terciptanya lapangan kerja yang baru di sektor informal;
- Selama bulan Mei-Agustus 2009, rumah tangga mengalami kehilangan penghasilan, terutama di daerah-daerah perdesaan dan bagi rumah tangga miskin. Sudut pandang tersebut tidak berubah sepanjang periode bulan Agustus-November 2009, dan November 2009 – Februari 2010;
- Antara bulan April dan Juli 2009, rumah tangga melaporkan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Selama bulan Juli sampai dengan Oktober 2009, kondisi tersebut nampaknya membaik;
- Tidak ada bukti peningkatan upaya untuk mencari pekerjaan baik dari pekerja anak maupun pekerja wanita;
- Sepanjang periode dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2009, penurunan jam kerja, kenaikan harga pangan, dan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan konsumsi harian nampaknya menyebabkan sejumlah rumah tangga untuk mengganti lauk-pauknya dengan lauk pauk dengan mutu atau biaya yang lebih rendah;
- Tidak adanya bukti peningkatan upaya untuk mencari pekerjaan dengan merantau atau migrasi.

Penilaian kualitatif menunjukkan bahwa tingkat keparahan dari dampak-dampak krisis tersebut berbeda antar sektor. Terdapat sektor-sektor yang terkena dampak yang parah dari krisis, seperti industri elektronik dan otomotif, sementara sektor-sektor lainnya, seperti industri tekstil dan garmen, dan sektor-sektor perikanan merasakan dampak yang lebih ringan. Tingkat keparahan dampak pada masing-masing sektor dan kelompok dalam masyarakat juga berbeda-beda, tergantung pada beberapa hal seperti tingkat integrasi sektor-sektor tersebut dalam perekonomian global, ketersediaan alternatif penghasilan atau

pekerjaan, dan faktor kepemilikan aset serta faktor musim yang dapat mempengaruhi hasil produksi dari masing-masing sektor.

Masyarakat miskin dan rentan merupakan salah satu kelompok yang terkena dampak paling besar karena krisis. Penilaian kualitatif menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan rentan dapat terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam sejumlah sektor atau kalangan masyarakat, kelompok-kelompok lainnya seperti para pengusaha juga mungkin terpengaruh oleh krisis, namun mereka biasanya memiliki aset dan/atau sumber daya produktif lainnya yang memberikan mereka daya tahan yang lebih baik untuk mengatasi dampak-dampak krisis. Hasil-hasil kuantitatif menunjukkan bahwa dampak-dampak pada orang miskin lebih besar daripada untuk orang yang tidak miskin, walaupun hal tersebut antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan krisis seperti kenaikan harga pangan pada triwulan ketiga tahun 2009.

SMKG yang disusun penting untuk disempurnakan sebagai suatu sistem yang dapat digunakan untuk pemantauan dampak krisis secara kuantitatif dan kualitatif, untuk memberikan informasi yang lebih baik untuk merumuskan respon-respon kebijakan dan program yang sesuai. Kedua pendekatan penilaian tersebut juga saling melengkapi, karena pemantauan kuantitatif akan berfokus pada situasi dengan skala negara, provinsi, dan kabupaten atau kota, sedangkan pemantauan kualitatif akan memberikan informasi konkrit tentang keadaan setempat di tingkat desa dan masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun suatu sistem pemantauan dan respon krisis untuk mengetahui dampak krisis keuangan global terhadap kesejahteraan rumah tangga Indonesia. Sistem dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme-mekanisme transmisi krisis keuangan global ke rumah tangga, khususnya rumah tangga rentan, mekanisme-mekanisme penanggulangan yang terkait yang diterapkan oleh rumah tangga, serta *outcome* sosial-ekonomi yang diperoleh. Sistem tersebut akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang tepat sesuai dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Untuk melakukan pemantauan dan respon dampak krisis keuangan global, Tim Monitoring dan Respon Dampak Krisis Keuangan Global yang diketuai oleh Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, bekerjasama dengan BPS dan dengan dukungan pendanaan AusAID serta dukungan teknis Bank Dunia dan SMERU melakukan langkah-langkah untuk:

1. **Menyusun survey cepat untuk memantau dampak krisis keuangan global di tingkat rumah tangga.** Konsep survey cepat disusun untuk memantau dampak secara kuantitatif dan kualitatif.
2. **Menerapkan sistem yang disusun untuk memantau dampak krisis kuantitatif** melalui Survei Monitoring Krisis Global (SMKG). Tujuan utama dari SMKG adalah untuk menghasilkan data yang menunjukkan dampak krisis di Indonesia selama jangka waktu empat kuartal melalui tiga tahap pengumpulan data. SMKG dilaksanakan oleh BPS dan Bappenas, dengan assistensi teknis dari Bank Dunia.
3. **Pemantauan dampak krisis kualitatif** untuk memberikan informasi kualitatif tentang bagaimana krisis global telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan bagaimana mereka menanggulangi guncangan tersebut. Studi kualitatif tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian SMERU

Baik untuk SMKG maupun studi kualitatif, terdapat laporan yang terpisah yang mendokumentasikan pendekatan dan temuan-temuan secara lebih rinci. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menyajikan kumpulan gambaran yang merangkum poin-poin penting dari kedua penilaian tersebut.

1.2 Pemantauan Dampak Krisis Kuantitatif

Pemantauan dampak krisis kuantitatif dilakukan melalui tiga tahap pengumpulan data oleh staf BPS di daerah. Dalam setiap tahap survei, data dikumpulkan dari sebuah panel yang terdiri dari 30 rumah tangga di 471 kabupaten/kota, mencakup semua 33 provinsi, serta data dari lima Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Survei dilakukan sebagai berikut:

- Tahap pertama SMKMG dilakukan pada bulan Agustus 2009, mengumpulkan data untuk bulan Juli/Agustus 2009, serta untuk bulan April/Mei 2009¹. Rumah tangga yang diwawancarai merupakan bagian dari sampel Sakernas dan SMKMG dilakukan dalam bentuk pengumpulan data tambahan untuk 30 rumah tangga yang termasuk ke dalam sampel SMKMG dalam setiap kabupaten/kota
- Tahap kedua SMKMG dilakukan pada bulan November-Desember 2009, terkait dengan kondisi pada bulan Oktober/November 2009. Tahap ini dilakukan sebagai survei mandiri, di mana rumah tangga yang sama dikunjungi kembali.
- Tahap ketiga SMKMG dilakukan pada bulan Februari 2010, terkait dengan kondisi pada bulan Januari/Februari 2010. Survei tersebut kembali dilakukan sebagai pelengkap survei Sakernas, dengan data untuk rumah tangga sampel SMKMG diperoleh setelah data Sakernas.

Pertanyaan terkait dengan angkatan kerja yang merupakan 10 pertanyaan dari 34 pertanyaan dalam kuesioner SMKMG hanya ditanyakan kepada kepala rumah tangga, dan tidak untuk semua anggota rumah tangga yang berusia 10 tahun ke atas. Susunan kata dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam kuesioner Sakernas. Oleh karena itu, data tersebut hanya dikumpulkan sekali, selama penyelenggaraan kuesioner Sakernas, dan jawaban-jawabannya disalin ke kuesioner SMKMG.

Kerangka kerja analitis yang digunakan dalam pemantauan krisis kuantitatif dapat dilihat di gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1: Kerangka kerja analitis untuk pemantauan krisis kualitatif

¹ Terdapat perbedaan waktu untuk indicator-indikator yang berbeda: indicator-indikator pasar tenaga kerja adalah untuk minggu pertama bulan Mei/Agustus/November/Februari, sementara sebagian besar indicator lainnya adalah untuk bulan April/Juli/Oktobre/Januari.

SMKG berfokus pada pengidentifikasian dan pengkuantifikasian perubahan-perubahan “negatif” dalam situasi rumah tangga. Survei tersebut bertujuan untuk menghasilkan perkiraan indikator-indikator utama dan perubahannya di tingkat pusat dan provinsi setiap kuartal dan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang nampaknya menjadi “berisiko” secara sosial-ekonomi akibat dari suatu guncangan, dalam kasus ini krisis global.

Indikator-indikator survei kuantitatif dianalisis dalam empat kelompok: pasar tenaga kerja; perekonomian rumah tangga; mekanisme penanggulangan, dan hasil-hasil. Gambar di atas menunjukkan bagaimana krisis global dapat mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja dan perekonomian rumah tangga, bagaimana para individu dan rumah tangga dapat menanggulangi keragaman yang ada, dan dampak-dampak apa yang mungkin terjadi terhadap hasil-hasil.

Fokus utama dari analisis data kuantitatif adalah perubahan kuartal per kuartal, terutama perubahan ke arah negatif. Untuk sejumlah indikator, seperti jam kerja mingguan kepala rumah tangga, persepsi tentang perubahan pada pendapatan atau konsumsi, diberikan pula perubahan setiap enam bulan.

Perlu ditekankan bahwa, karena pendekatan dengan sampel kecil dengan hanya 30 rumah tangga per kabupaten/kota, survei tidak bertujuan untuk memberikan perkiraan yang akurat untuk indikator-indikator di tingkat kabupaten/kota karena rentang kepastian yang terlalu luas. Sebaliknya, survei bertujuan untuk menentukan, dengan tingkat kepastian statistik yang ditentukan, apabila nilai suatu indikator menunjukkan perubahan negatif yang signifikan, sebagai contoh apakah terjadi penurunan jam kerja yang diamati dengan kemungkinan probabilitas sebesar 95 persen atau tidak.

1.3 Pemantauan Dampak Krisis Kualitatif

Tujuan pemantauan dampak krisis kualitatif adalah untuk memberikan penilaian yang cepat dan *real/semi-real time* untuk memantau dan mengevaluasi dampak-dampak krisis terhadap keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Pemantauan juga bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan/program-program perlindungan sosial yang ditujukan untuk menanggulangi dampak krisis. Untuk melakukan hal tersebut, dilakukan tiga jenis kegiatan: pemantauan berita, pemantauan sosial-ekonomi masyarakat, dan studi-studi kasus.

Pemantauan berita bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan yang terjadi karena krisis global dan dampaknya pada sektor-sektor dan masyarakat tertentu, sebagaimana dikumpulkan dari laporan-laporan surat kabar nasional dan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan selama satu tahun oleh dua orang peneliti di tingkat nasional dan delapan orang peneliti di daerah. Hasil-hasil dari kegiatan tersebut adalah basis data berita dan laporan ringkasan bulanan. Sejumlah persoalan yang mengemuka adalah: dampak krisis global terhadap kondisi tenaga kerja, dampak-dampak sektoral, harga-harga komoditi (makanan dan komoditi ekspor), serta kebijakan-kebijakan/program-program yang ada untuk menanggulangi dampak krisis.

Pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah penilaian kualitatif terhadap keadaan sosial ekonomi di tingkat masyarakat dan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memahami dampak krisis global terhadap mata pencaharian masyarakat, terutama

masyarakat miskin, dan bagaimana mereka menanggulangi guncangan tersebut (yaitu, seberapa dalam dampak krisis yang dirasakan dan bagaimana kebijakan-kebijakan/program-program yang ada telah, atau belum membantu mereka). Pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga menilai persepsi dan tanggapan pemerintah daerah terhadap krisis tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan di enam desa di enam kabupaten/kota yang dipilih secara sengaja, berdasarkan kemungkinan bahwa daerah tersebut mungkin akan terkena dampak (sebagaimana terkumpul dari pemantauan berita), terhadap data sekunder dan terhadap penilaian yang dilakukan oleh peneliti setempat. Lokasi-lokasi pemantauan adalah:

1. Kabupaten Bandung, Jawa Barat (industri/para pekerja di bidang tekstil dan garmen);
2. Kabupaten Lombok Barat, NTB (industri gerabah skala kecil yang berorientasi ekspor);
3. Kabupaten Kampar, Riau (perkebunan kelapa sawit);
4. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (industri mebel skala kecil yang berorientasi ekspor);
5. Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara (industri perikanan dan perkebunan minyak kelapa);
6. Kabupaten Malang, Jawa Timur (pengiriman para pekerja migran ke luar negeri).

Kunjungan ke masing-masing lokasi dilakukan sebanyak tiga kali, untuk melihat perkembangan keadaan masyarakat selama dan setelah krisis. Kunjungan yang pertama dilakukan pada bulan Juli/September 2009, kunjungan yang kedua pada bulan November/Desember 2009, dan kunjungan ketiga pada bulan April/Mei 2010.

Selain lokasi-lokasi di atas, kunjungan juga dilakukan ke dua lokasi lainnya dari studi percontohan dampak krisis global yang sebelumnya, yaitu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (industri manufaktur) dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (perkebunan karet). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat ini adalah: wawancara mendalam dengan para pemberi informasi utama di tingkat kabupaten, desa, dan rumah tangga, Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*, FGD) dengan para tokoh desa dan kelompok-kelompok yang terdampak (pria dan wanita secara terpisah, remaja dan anak-anak), dan pengamatan.

Kegiatan ketiga adalah **studi kasus**. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian secara cepat terhadap persoalan-persoalan/masalah-masalah tertentu yang terkait dengan dampak-dampak krisis di sektor/sektor/industri-industri tertentu atau terhadap efektivitas kebijakan-kebijakan/program-program penanggulangan krisis. Tiga studi kasus dilakukan dengan topik untuk setiap studi yang dipilih melalui konsultasi dengan Bappenas untuk relevansi kebijakan yang optimal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara mendalam, analisis data sekunder, dan FGD (apabila diperlukan). Topik-topik studi kasus adalah sebagai berikut:

1. **Peran program-program perlindungan sosial dalam menanggulangi dampak krisis global** di Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan), bulan Agustus - November 2009;
2. **Program stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur padat karya dan perannya dalam menanggulangi dampak krisis** di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, bulan Januari - April 2010;
3. **Keadaan para pekerja usia remaja di daerah-daerah perkotaan terkait dengan krisis global** di Kota Samarinda (Kalimantan Timur) dan Kota Tangerang (Banten), bulan Mei – Juni 2010.

Aturan analitis umum yang diikuti dalam penilaian-penilaian tersebut adalah penilaian harus peka terhadap gender (sumber informasi – pria dan wanita); memperhatikan kelompok usia (analisis yang peka terhadap usia, dampak pada anak-anak); dan terfokus pada kemiskinan (analisis yang peka terhadap tingkat kesejahteraan dan dampak krisis global terhadap masyarakat miskin dan masyarakat paling miskin).

1.4 Gabungan antara Pemantauan Kualitatif dan Kuantitatif Dampak Krisis

Pada saat SMKG dirancang pada bulan Mei 2009, maksudnya adalah bahwa dengan melakukan penilaian cepat secara teratur, pemantauan krisis kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang menyebabkan perubahan. Secara khusus, penilaian tersebut akan menegaskan (atau tidak) hasil-hasil SMKG di wilayah-wilayah tertentu serta akan memberikan kemungkinan penyebab dan tren untuk perubahan-perubahan yang diamati dalam data kuantitatif, dan akan membantu menentukan potensi efektivitas berbagai respon kebijakan.

Tujuan utama dari menggabungkan pemantauan krisis kuantitatif dan kualitatif adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan hasil-hasil² dari kedua jenis penilaian. Peningkatan tersebut dapat terjadi dengan salah satu atau lebih dari empat kemungkinan cara berikut ini.

- a) **Validitas internal atau kredibilitas.** Hal ini berkaitan dengan “kebenaran” hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil penilaian kualitatif dapat memastikan hasil-hasil survei kuantitatif, atau sebaliknya. Penilaian kuantitatif dan kualitatif yang sebagian besar berkaitan satu sama lain memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa kedua rangkaian hasil tersebut kredibel.
- b) **Validitas eksternal atau transferabilitas.** Hal ini mengacu pada situasi di mana hasil-hasil yang diperoleh juga berlaku untuk lokasi-lokasi lainnya atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Untuk pemantauan krisis yang berjalan, hal tersebut berarti bahwa, berdasarkan kemiripan pola-pola dampak krisis global sebagaimana diidentifikasi oleh survei kuantitatif, pemahaman dampak krisis dan jalan pemulihan melalui penilaian kualitatif di lokasi-lokasi spesifik akan membantu memahami dampak krisis di tempat lainnya.
- c) **Keandalan atau dependabilitas.** Hal ini terkait dengan perolehan hasil-hasil yang sama/serupa ketika penilaian diulangi dengan para responden yang sama/serupa dalam konteks yang sama atau serupa. Sebagai contoh, pemeriksaan terhadap hasil-hasil dari dunia jenis penilaian untuk kelompok-kelompok atau lokasi-lokasi yang memiliki karakteristik yang serupa (misalnya, masyarakat nelayan kecil, atau masyarakat petani padi) dapat dilakukan untuk perilaku yang sama seiring dengan berjalannya waktu. Namun, karena jumlah studi kualitatif relative sedikit dan lokasi-lokasi tempat studi tersebut dilakukan dipilih karena karakteristik uniknya, konfirmasi atas keandalan antara penilaian kualitatif dan kuantitatif tersebut tidak benar-benar terjadi.
- d) **Objektivitas atau konfirmabilitas.** Hal ini terkait dengan peningkatan kepastian bahwa hasil-hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi, atau hanya secara marjinal dipengaruhi, oleh keberpihakan karena ketidakcukupan dan/atau motivasi atau persepsi individual terhadap para pengumpul data kuantitatif dan para penyelidik dalam studi kualitatif. Mengingat bahwa para pengumpul data dan para penyelidik

² Bagian tentang tingkat kepercayaan ini diambil dari Marsland *et al* (2000).

dalam studi cukup berbeda, sifat kebetulan atau hampir kebetulan dari hasil-hasil yang diperoleh dapat dianggap sebagai indikasi kurangnya keberpihakan.

Secara ringkas, dengan mempertimbangkan sifat (hampir) kebetulan dari hasil-hasil yang diperoleh, penilaian kualitatif memperkuat kredibilitas dan objektivitas dari penilaian kuantitatif, dan penilaian kuantitatif menambah keyakinan bahwa temuan-temuan dalam penilaian kualitatif dapat digeneralisasi.

2. Krisis secara Umum

2.1 Gambaran Makro tentang Penyebaran Krisis dan Urutan Waktu Krisis

Sampai dengan bulan September 2008, perekonomian Indonesia masih menunjukkan sejumlah ketahanan terhadap krisis global. Perekonomian melemah, namun performanya lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Namun pada akhir kuartal 2008, gambaran makro menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mulai merosot karena dampak krisis global. Penyebaran dampak yang paling luas terjadi melalui sektor ekspor dengan turunnya permintaan dan jatuhnya harga-harga beberapa komoditi seperti minyak mentah, karet dan produk-produk karet, lemak dan minyak hewani/nabati (minyak sawit), kopi, dan coklat. Sektor-sektor yang memperoleh keuntungan dari krisis moneter tahun 1997-1998 lebih terpuak oleh krisis global di tahun 2008-2009.

Menurunnya pertumbuhan PDB dari ekspor dimulai pada kuartal ketiga tahun 2008. Nilai ekspor di kuartal terakhir tahun 2008 menunjukkan tren penurunan seiring dengan merosotnya nilai ekspor dari sebesar AS\$12,4 triliun menjadi sebesar AS\$9,7 triliun (BPS, 2008). Penurunan terbesar dalam pertumbuhan sektoral terjadi di industri-industri manufaktur (tekstil-kulit-alas kaki, kayu, dan produk-produk kayu) dan perdagangan, hotel, dan restoran-restoran (perdagangan ritel dan besar). Pertumbuhan sektor-sektor tersebut menurun sampai ke titik yang terendahnya pada pertengahan/kuartal ke-3 tahun 2009.

Pada kuartal terakhir tahun 2009, kondisi tersebut mulai memulih. Pertumbuhan sektor manufaktur telah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal yang sama setahun sebelumnya, dan demikian pula, untuk pertumbuhan perdagangan, hotel dan restoran, walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2008. Pertumbuhan ekspor juga meningkat dan menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun 2008.

Tabel 2.1: Pertumbuhan PDB (dalam %) berdasarkan sektor

Sektor	2008				2009			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	6,4	4,8	3,3	5,1	5,9	3,0	3,3	4,6
Pertambangan dan penggalian	-1,6	-0,4	2,3	2,4	2,6	3,4	6,2	5,2
Industri manufaktur	4,3	4,2	4,3	1,9	1,5	1,5	1,3	4,2
Persediaan listrik, gas, dan air	12,3	11,8	10,4	9,3	11,3	15,3	14,5	14,0
Konstruksi	8,2	8,3	7,8	5,9	6,3	6,1	7,7	8,0
Perdagangan, hotel, dan restoran	6,8	7,7	7,6	5,5	0,6	-0,0	-0,2	4,2
Transportasi dan Komunikasi	18,1	16,6	15,6	16,1	16,8	17,0	16,5	12,2
Keuangan, ril estate, dan jasa usaha	8,3	8,7	8,6	7,4	6,3	5,3	4,9	3,8
Jasa	5,5	6,5	7,0	5,9	6,7	7,2	6,0	5,7
PDB (minyak)	6,2	6,3	6,3	5,3	4,5	4,1	4,2	5,4
PDB (bukan minyak)	6,7	6,7	6,7	5,7	4,9	4,5	4,5	5,9

Sumber: BPS

Tabel 2.2: Pertumbuhan PDB (dalam %) berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	2008				2009				2010
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5,7	5,5	5,3	4,8	6,0	4,8	4,8	4,0	3,9
Konsumsi Akhir Pemerintah	3,6	5,3	14,1	16,4	19,3	17,0	10,3	17,0	-8,8
Pembentukan modal dalam negeri bruto	13,9	12,2	12,3	9,4	3,5	2,4	3,2	4,2	7,9
Ekspor barang dan jasa	13,6	12,4	10,6	2,0	-18,7	-15,5	-7,8	3,7	19,6
Impor barang dan jasa (-/-)	18,0	16,1	11,1	-3,7	-24,4	-21,0	-14,7	1,6	22,6
PDB	6,2	6,3	6,3	5,3	4,5	4,1	4,2	5,4	5,7

Sumber: BPS

Hasil dari kegiatan pemantauan media dan pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sejumlah masyarakat menunjukkan tren yang sama dengan gambaran makro urutan waktu krisis. Walaupun studi-studi yang dilakukan menunjukkan bahwa urutan waktu krisis berbeda di seluruh sektor, secara umum dampak krisis mulai dirasakan pada bulan Oktober-November 2008. krisis global berdampak pada industri-industri yang berorientasi pada ekspor, seperti perkebunan karet dan minyak sawit, kayu dan mebel kayu, pertambangan, manufaktur – terutama pada tekstil garmen – sektor otomotif dan elektronik. Setelah itu, sejumlah sektor seperti industri manufaktur, elektronik, dan otomotif serta perkebunan kelapa sawit mengalami puncak krisis pada bulan Januari dan Februari 2009. Harga tandan buah segar mencapai titik terendahnya pada bulan Februari 2009 di mana setelah itu harga mulai naik kembali.

Dampak krisis terus dirasakan sampai dengan sekitar bulan September 2009. Kemudian, dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, sejumlah sektor mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal, seperti yang dialami oleh industri mebel kayu dan industri kerajinan gerabah yang berorientasi pada ekspor. Pemulihan terus berlangsung hampir di semua sektor di kuartal pertama dan kedua tahun 2010, namun kondisi kesejahteraan sektoral dan masyarakat belum sepenuhnya pulih ke keadaan sebelum krisis. Sebuah masyarakat yang berkecimpung di perkebunan kelapa sawit bahkan mengalami dampak kedua dari krisis.

2.2 Faktor-Faktor Lain

2.2.1 Harga Pangan

Setelah dirasakannya dampak dari krisis global di sejumlah sektor, kunjungan lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa, selain krisis global, faktor lain yang juga menyebabkan kesulitan ekonomi di tingkat masyarakat dan rumah tangga adalah harga pangan. Tingginya harga pangan terus menjadi masalah hampir di semua masyarakat, dan terus naik. Keluhan yang paling banyak diterima adalah tentang tingginya harga beras, gula, dan minyak goreng dan kenaikannya yang berkisar antara Rp. 500-1.500 di setiap kenaikan. Harga-harga tersebut sebenarnya berfluktuasi di mana hari Idul Fitri dan Natal merupakan periode puncak untuk komoditi-komoditi tersebut. Ketika bulan puasa berakhir, harga-harga di sejumlah tempat bervariasi dan kembali ke situasi yang lebih stabil. Panen raya juga dapat berdampak pada harga sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung di awal tahun 2010 ketika harga beras sedikit mengalami penurunan. Program-program intervensi pemerintah, seperti Operasi Pasar untuk komoditi seperti minyak goreng juga mengakibatkan harga yang lebih

rendah. Walaupun demikian, tingginya harga pangan telah menambah dampak krisis global sebagaimana dilaporkan sebagian besar oleh masyarakat miskin dan masyarakat paling miskin.

Tabel 2.3: Harga komoditas di lokasi-lokasi yang dikunjungi (dalam Rupiah)

		Bandung	Riau	Lombok	Malang	Jejara	Bitung
Juli/September 2009 (Kunjungan Tahap Pertama)	Beras	4.000-4.500/liter	6.000-7.000/kg	5.000/kg	–	4.000/kg	4.500-6.000/kg
	Minyak Goreng	10.000/kg	9.000/kg	8.000/kg	11.000/kg	10.000/kg	12.000/liter
	Gula	8.500/kg	8.500/kg	–	9.500/kg	10.000/kg	10.000-11.000/kg
	Telur	–	–	–	–	1.000/butir	–
	Bensin	4.500/liter	--	–	–	–	–
	Minyak Tanah	8.000/liter	5.000-6.000/liter	–	–	5.000/liter	3.000-4.000/liter
November-Desember 2009 (Kunjungan Tahap Kedua)	Beras	4.500 – 5.500/liter	6.000-7.000/kg	5.500/kg	5.500/ liter	6.000/kg	5.000-6.000/kg
	Minyak Goreng	8.000-9.000/kg	7.500/kg	9.000/kg	–	8.000/kg	12.000/liter
	Gula	10.000/kg	10.000-12.500/kg	–	10.000/kg	9.000-10.000/kg	10.000/kg
	Telur	–	–	–	–	14.000/butir	–
	Bensin	4.500/liter	–	–	–	–	–
	Minyak Tanah	6.000-8.000/liter	5.000/liter	–	–	8.000/liter	5.000-6.000/liter
April-Mei 2010 (Kunjungan Tahap Ketiga)	Beras	4.500/liter (krn musim panen)	6.500-8.000/kg	6.000 – 7.000/kg	5.000/liter	6.000/kg	5.500-6.500/kg
	Minyak Goreng	8.000-9.000/kg	10.000/kg	10.000 – 12.000/kg	9.000/kg	–	10.000/liter
	Gula	10.000-11.000/kg	10.000-11.000/kg	–	10.000/kg	10.000-12.000/kg	9.000-10.000/kg
	Telur	–	–	–	–	–	–
	Bensin	5.000/liter	–	–	–	–	–
	Minyak Tanah	8.500/liter	5.000/liter	–	–	5.000/liter	3.000-5.000/liter

Sumber: Diperoleh oleh SMERU pada kunjungan lapangan

2.2.2 Siklus Musim

Selain harga pangan, siklus musim juga berperan dalam sektor-sektor dan mata pencaharian masyarakat yang menjadi bahan studi. Sejumlah sektor yang berorientasi ekspor, seperti industri mebel kayu di Kabupaten Jejara, kerajinan gerabah skala menengah di Kabupaten Lombok, dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Riau, adalah di antara beberapa sektor yang terpengaruh oleh siklus musim.

Untuk para pengusaha mebel kayu di Kabupaten Jepara, siklus musim dalam pekerjaan biasanya terkait dengan musim-musim tertentu di negara-negara tujuan ekspornya (AS dan Eropa). Pesanan kerja biasanya dilakukan selama musim dingin, ketika penjualan untuk musim panas berikutnya disiapkan. Hal ini berarti bahwa, selama jangka waktu lima bulan dari bulan Desember sampai dengan April, para pengrajin di Jepara yang membuat mebel *outdoor*/taman memiliki pekerjaan tetap dan mendapat penghasilan, namun selama masa yang lebih sulit yang berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Agustus, mereka seringkali mencari pekerjaan sampingan lain, biasanya di sektor pertanian untuk menambah penghasilannya. Krisis Keuangan Global Tahun 2008-2009 memperburuk dampak pola siklus musim ini di industri mebel kayu. Kunjungan-kunjungan lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha dan pekerja tidak menerima pesanan sama sekali selama beberapa bulan di musim sepi pada pertengahan tahun 2009 karena krisis global. Menjelang akhir tahun, pesanan mulai meningkat, mengikuti pola musim, namun hal tersebut tidak memberikan pemulihan penuh pada pasar tujuan.

Tren yang serupa dapat diamati pada kerajinan gerabah di Kabupaten Lombok, di mana terjadi sejumlah pemulihan dari krisis global untuk para pengrajin gerabah menjelang akhir tahun 2009. Pesanan mulai meningkat dari bulan September 2009 karena tingginya permintaan dari Eropa dan AS untuk jenis-jenis produk tertentu seperti tempat lilin seiring dengan datangnya Natal dan Tahun Baru. Masyarakat yang menjadi subyek studi melaporkan bahwa kenaikan pesanan mencapai 25 persen. Oleh karena itu, sejumlah orang mulai membuat gerabah kembali, walaupun harga belum mengalami kenaikan.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Riau juga mengalami siklus musim yang mempengaruhi kapasitas produksi pohon sawit. Musim produksi rendah (musim trek) biasanya dimulai menjelang musim kering di bulan April dan berlangsung selama sekitar tiga bulan. Pada bulan April 2009, para petani sawit menghadapi musim produksi rendah biasa (musim trek), namun pada bulan April 2010, produksi menurun secara drastis karena kekeringan yang berkepanjangan (lebih dari enam bulan) dan kurangnya pupuk selama krisis global pada tahun 2009, hal tersebut terjadi meskipun dengan tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang hampir kembali ke tingkat harga sebelum krisis level (Rp. 1.150/kg).

2.2.3 Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Faktor-Faktor Lain

Pemilihan umum tahun 2009 (dengan pemilihan anggota legislatif pada tanggal 9 April dan pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli), perayaan Idul Fitri (pada tanggal 21-22 September) dan perayaan nasional lainnya seperti perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus adalah peristiwa-peristiwa yang memperlunak dampak krisis global. Di sejumlah masyarakat, seperti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jepara, peristiwa-peristiwa tersebut mengurangi dampak krisis global untuk kelompok-kelompok tertentu di masyarakat tersebut.

Di Kabupaten Bandung, para pemilik industri kecil dan menengah, khususnya produsen sarung, pakaian olahraga, dan handuk, menyatakan bahwa selama tahun 2008 bisnis mereka relatif stabil. Pesanan yang diterima oleh para produsen sarung kemudian meningkat pada tahun 2009, berkaitan dengan permintaan akan sarung selama bulan Ramadan dan untuk perayaan Idul Fitri, sampai mereka mengalami kekurangan bahan mentah. Situasi yang sama juga dirasakan oleh bisnis-bisnis yang memproduksi bahan *paris* dan *asahi*. Pesanan terus meningkat dan mencapai puncaknya selama pemilihan anggota legislatif dan pemilihan

presiden di pertengahan tahun 2009, serta persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Nasional pada bulan Agustus.

Industri-industri mebel kayu skala kecil dan menengah di Kabupaten Jepara juga diuntungkan oleh Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2009. Terjadi peningkatan permintaan untuk produk-produk mereka dari pasar dalam negeri yang mengimbangi penurunan permintaan dari luar negeri karena krisis global.

3. Dampak Krisis

3.1 Akibat Krisis secara Umum

Ketika dampak krisis global mulai dirasakan di Asia Tenggara pada kuartal empat tahun 2008, Indonesia menghadapinya dengan posisi yang cukup kuat: Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia Timur yang tidak mengalami penurunan angka pertumbuhan di semester pertama tahun 2008, meskipun kondisi pasar global tidak stabil dan melambatnya ekonomi dunia (World Bank, 2008). Namun, karena menurunnya perekonomian para mitra dagang utama Indonesia, ekspor mengalami penurunan yang cepat di semester pertama tahun 2009. Dampak yang paling berat dialami oleh sektor-sektor dan provinsi-provinsi yang lebih berorientasi pada ekspor, namun konsumsi dalam negeri yang kuat membantu perekonomian makro Indonesia untuk menghadapi kondisi tersebut, dan pemulihan mulai terlihat pada kuartal kedua tahun 2009.

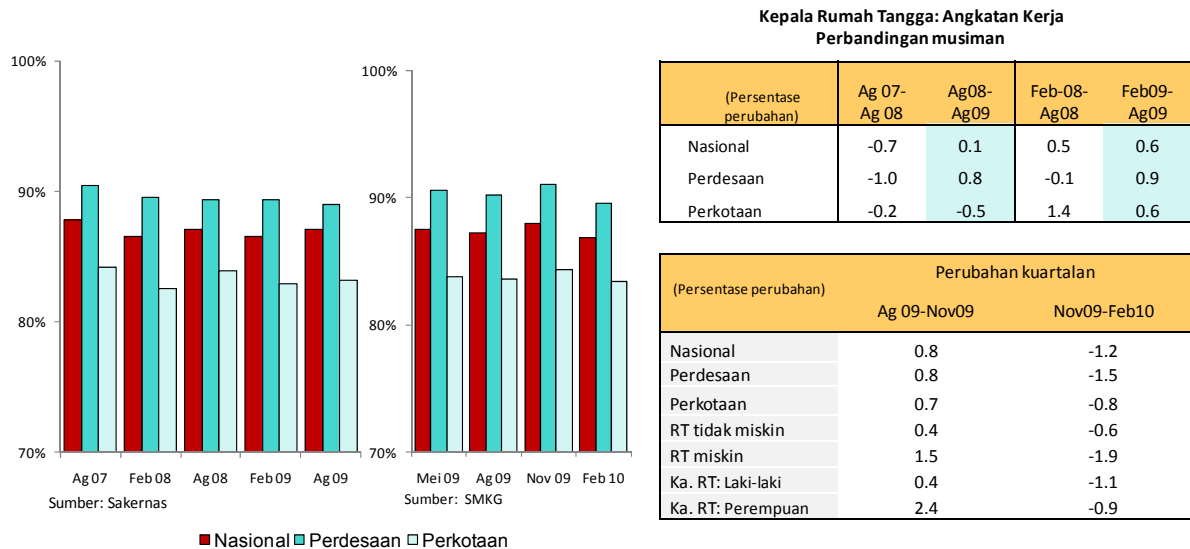
Kesulitan juga terjadi. Data BPS menunjukkan kenaikan sejumlah bahan pangan di semester kedua tahun 2009. Hal tersebut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk masyarakat miskin untuk yang mana pangan mewakili hampir tiga perempat konsumsi mereka. Selain itu, pasar tenaga kerja semakin luas menjelang akhir tahun 2008, namun sebagian besar pertumbuhan tersebut terjadi dalam pekerjaan tidak tetap dan pekerjaan tanpa bayaran.

Dampak awal krisis dirasakan jauh sebelum bulan April 2009, kuartal pertama untuk yang mana pengumpulan data dilakukan oleh SMKG. Oleh karena itu, hasil-hasil SMKG tidak menunjukkan, dan tidak dapat diperkirakan untuk menunjukkan, dampak awal krisis global. Namun, SMKG diharapkan dapat memperlihatkan efek-efek lanjutan. Hal tersebut dapat merupakan kelanjutan, mungkin bahkan memperburuk, masa-masa sulit, atau tanda-tanda pemulihan.

Bab ini menguraikan dampak-dampak krisis untuk Indonesia secara keseluruhan. Bab ini berfokus pada dampak-dampak terhadap tenaga kerja dan perekonomian rumah tangga, dan strategi-strategi penanggulangan krisis yang diterapkan untuk mengatasinya.

3.2 Dampak terhadap Tenaga Kerja

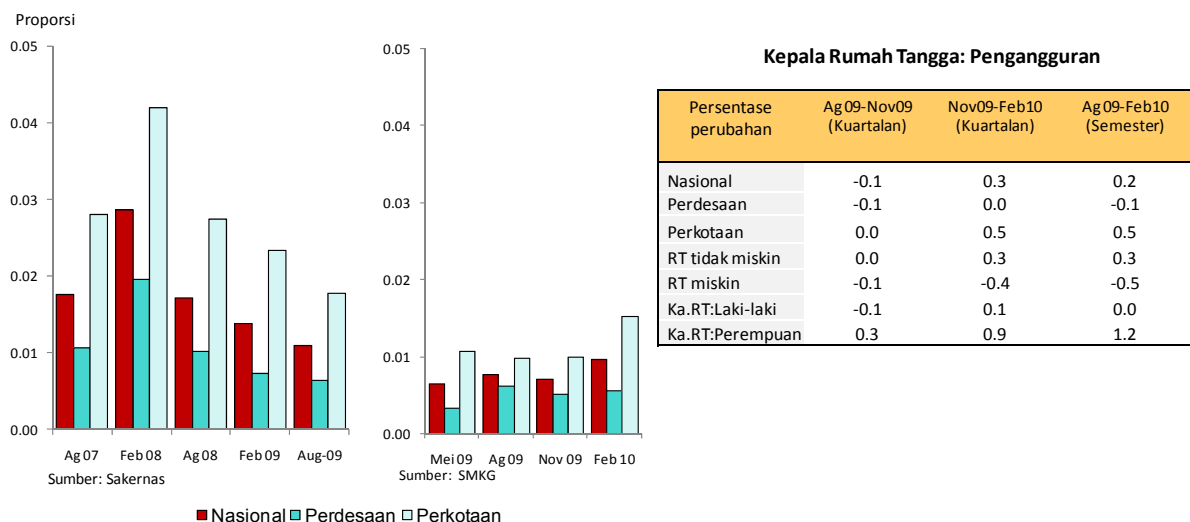
3.2.1 Perubahan Angkatan Kerja



Gambar 3.1: Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang aktif secara ekonomi

Data SMKG menunjukkan sedikit penurunan dalam persentase kepala rumah tangga yang aktif secara ekonomi sepanjang periode bulan Mei-Agustus 2009, diikuti dengan kenaikan sepanjang bulan Agustus-November 2009, dan penurunan sepanjang bulan November 2009 - Februari 2010. Selama periode bulan Juli 2009 - Januari 2010, pergerakannya tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan sedikitnya atau tidak adanya dampak krisis global terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja kepala rumah tangga.

3.2.2 Pengangguran



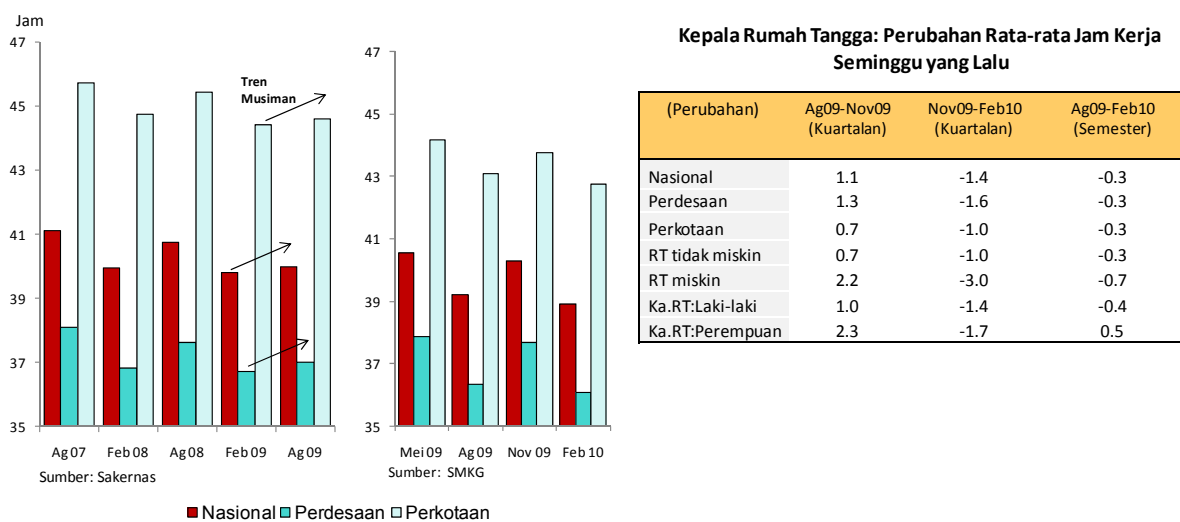
Gambar 3.2: Pengangguran kepala rumah tangga

Data Sakernas data dalam Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pengangguran para Kepala RT mencapai titik tertinggi pada semester pertama tahun 2008, dan hal tersebut lebih nyata

terlihat di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan. Krisis global nampaknya tidak menyebabkan kenaikan angka pengangguran Kepala RT; bahkan, angka pengangguran sebagian besar menurun selama periode krisis.

Data SMKG menunjukkan kenaikan pengangguran Kepala RT antara bulan November 2009 dan Februari 2010, namun hal tersebut mungkin merupakan gabungan antara efek siklus musim dan kenaikan kecil dalam angka pengangguran sepanjang periode tersebut. Data SMKG untuk bulan Agustus 2009 juga menunjukkan angka pengangguran secara nasional dan di daerah perdesaan yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil Sakernas. Anomali ini perlu dipelajari secara lebih detail.

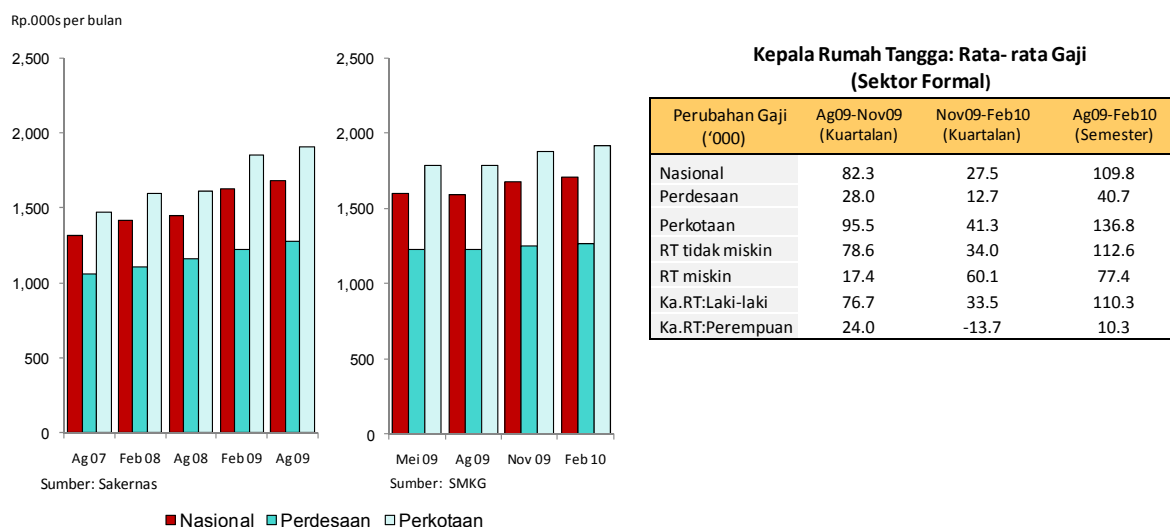
3.2.3 Perubahan Jam Kerja Kepala Rumah Tangga



Gambar 3.3: Jam kerja mingguan kepala rumah tangga

Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 3.3, data Sakernas data menunjukkan bahwa secara umum jam kerja mingguan lebih tinggi di bulan Agustus daripada bulan Februari. Data SMKG menunjukkan pergerakan yang signifikan antara kuartal bulan Agustus 2009, bulan November 2009 dan bulan Februari 2010. Sepanjang bulan Mei-Agustus 2009, jam kerja mengalami penurunan ketika diperkirakan bahwa jam kerja akan mengalami kenaikan musiman, sehingga penurunan tersebut dapat merupakan dampak dari krisis global. Kuartal berikutnya menunjukkan kenaikan ketika penurunan musiman seharusnya diperkirakan akan terjadi yang menunjukkan pemulihan. Penurunan sepanjang bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 sejalan dengan pergerakan musiman. Namun, karena tidak adanya pola musim per kuartal, penjelasan tersebut hanya bersifat perkiraan.

3.2.4 Upah/Penghasilan Kepala Rumah Tangga pada Sektor Formal

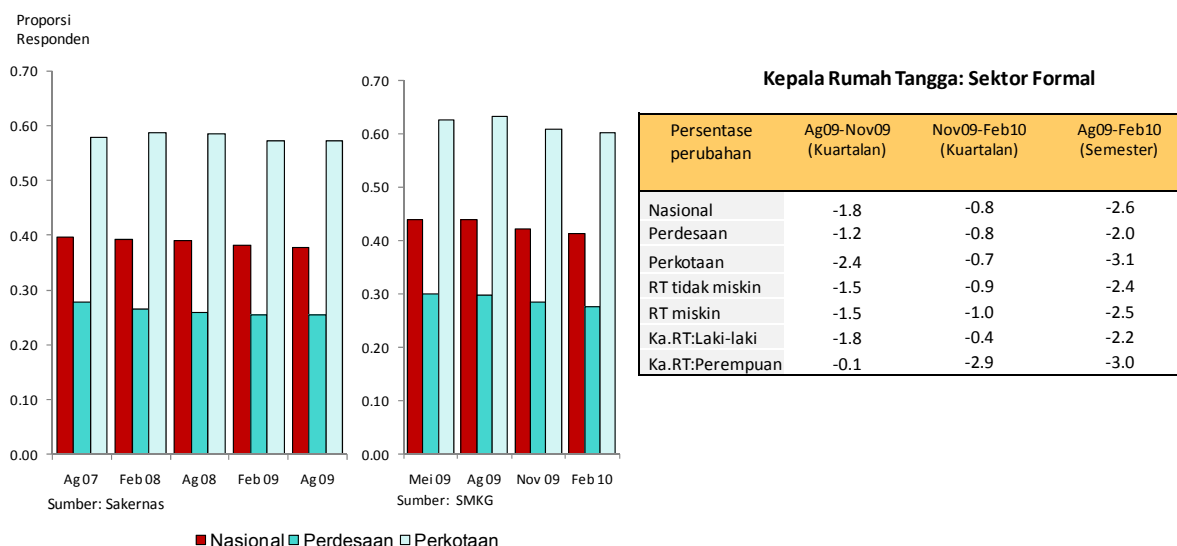


Gambar 3.4: Upah kepala rumah tangga dalam sektor formal

Menurut Sakernas, upah di sektor formal tetap cukup stabil. Data pada bulan Februari 2009, di tengah krisis, sebenarnya menunjukkan kenaikan dalam upah formal daripada stagnasi atau penurunan, khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Data SMKG untuk periode bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 juga menunjukkan tren yang stabil sampai dengan tren kenaikan, kecuali untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

3.2.5 Perubahan Sektor Formal/Informal Kepala Rumah Tangga



Gambar 3.5: Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal

Data dalam Gambar 3.5 menunjukkan penurunan proporsi yang kecil namun signifikan secara statistik untuk rumah tangga yang bekerja di sektor formal. Hal tersebut nampaknya

berkaitan dengan tren jangka panjang di mana penciptaan lapangan kerja di sektor formal tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru yang terjadi di sektor informal.

3.2.6 Temuan-Temuan Dampak terhadap Tenaga Kerja dari Pemantauan Kualitatif

Pemantauan kualitatif, sebagaimana diuraikan dalam bagian 1.3, termasuk pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang dampak krisis global terhadap mata pencaharian masyarakat daerah di desa-desa terpilih. Bagian ini secara singkat menyajikan temuan-temuan dalam pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terkait dengan keadaan tenaga kerja. Pembahasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam laporan pemantauan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terpisah.

a. Industri Elektronik dan Otomotif (Kabupaten Bekasi, Jawa Barat)

Di Desa Gandasari di awal tahun 2009, produksi sebagian besar industri elektronik dan otomotif sangat lamban dengan penurunan angkatan kerja dan pengurangan jam kerja. Hal tersebut secara khusus mempengaruhi para pekerja migran yang serta merta mengalami pemutusan kontrak (bahkan sebelum kontrak tersebut secara hukum berakhir), tidak dilakukannya perpanjangan kontrak, dan pengurangan jam kerja dan lembur. Sejumlah pekerja meninggalkan daerah tersebut, namun lainnya tetap tinggal berharap akan terjadinya pemulihan dini dari situasi ini.

Pada bulan Agustus 2009, sejumlah pemulihan telah terlihat karena beberapa industri telah memanggil kembali pekerja lama dan merekrut pekerja baru. Beberapa industri baru mulai memproduksi, memberikan lapangan kerja untuk 6.000 pekerja baru yang kebanyakan wanita muda. Namun, terdapat perbedaan dengan situasi sebelum krisis: pekerjaan lebih banyak diberikan berdasarkan kontrak daripada sebagai pekerja tetap, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada pengusaha untuk menyesuaikan permintaan tenaga kerja sesuai dengan permintaan akan produk mereka. Pekerja tetap digantikan dengan pekerja yang lebih murah dengan kontrak jangka pendek yang kurang terjamin. Juga ada semakin banyak buruh harian, dan pekerja yang dipekerjakan sebagai *trainee* (untuk menghindari keharusan untuk membayar upah minimum), dan mungkin terdapat hari libur bergilir untuk menghindari pembayaran lembur. Secara keseluruhan, hal tersebut menempatkan para pekerja dalam posisi tawar yang lebih lemah ketika menegosiasikan kondisi pekerjaan.

b. Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten Kampar, Riau)

Di perkebunan kelapa sawit di Kab. Kampar, penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di semester kedua tahun 2008 mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Seiring dengan jatuhnya harga TBS sesuai dengan permintaan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil-CPO*) dari luar negeri, dari Rp. 1.100/kg (Juni 2008) menjadi Rp. 600/kg (Oktober 2008) dan sampai Rp. 200-350/kg (Januari 2009), jam kerja pabrik dikurangi dari 12 sampai dengan 10 jam per hari. Hal ini berarti bahwa para pekerja tidak mendapatkan bayaran lembur atau bonus, dan harus bergantung hanya pada upah dasar mereka. Permintaan buruh harian lepas berkurang dan para petani menurunkan kapasitas produksinya untuk meminimalkan biaya pengangkutan buah sawit ke pabrik pengolahan. Semakin banyak orang beralih ke pekerjaan di sektor informal dan mengambil pekerjaan sebagai pekerja bangunan.

c. Kerajinan Gerabah (Kabupaten Lombok Barat, NTB)

Di Desa Banyumulek, krisis global memicu perubahan dalam pasar tenaga kerja untuk kerajinan gerabah. Secara umum, kaum wanita tidak lagi membuat gerabah untuk ekspor, dan kembali ke praktik tradisional membuat gerabah untuk kebutuhan rumah tangga karena mereka tidak memiliki keterampilan dan mata pencaharian alternatif. Gerabah tersebut kemudian dijual oleh kaum pria yang pergi ke kota-kota seperti Mataram dengan sepeda atau sepeda motor. Orang lain beralih ke pekerjaan yang tidak berhubungan dengan gerabah, seperti menyuplai barang ke toko-toko kecil, menjual mainan atau bunga, berpindah ke bisnis kerajinan rotan, atau mencari kerja di luar daerah. Secara khusus, kaum muda semakin sulit untuk mencari kerja di desa. Sebelumnya, laki muda mengecat gerabah dan wanita muda membuat gerabah, namun kini mereka tidak dapat lagi melakukan hal tersebut. Bagi sejumlah pemuda, terutama untuk laki-laki, bekerja di luar desa nampak menjadi salah satu dari sedikit alternatif yang tersedia. Bahkan anak-anak telah merasakan dampak dari jatuhnya industri gerabah. Sebelumnya mereka membantu para orang tua memoles gerabah, dan mereka menerima Rp. 25 untuk setiap gerabah berukuran kecil atau membawa pasir dari sungai yang digunakan untuk membakar gerabah. Mereka menggunakan uang saku tersebut untuk membeli makanan kecil atau menabungnya. Pada bulan Juli 2009, hal tersebut tidak lagi terjadi.

Pada bulan November 2009, situasi sedikit membaik karena adanya lagi permintaan musiman gerabah dari luar negeri, namun harga belum mengalami kenaikan, dan peningkatan harga bahan baku terus menimbulkan masalah. Pada bulan Maret 2010, keadaan ini belum menunjukkan perbaikan, dan kaum pria, khususnya, terus melakukan pekerjaan alternatifnya seperti menjual mainan dan bunga dengan sepeda motor. Terdapat sejumlah pekerjaan sementara di bidang pertanian terkait dengan musim panen (seperti menjual jerami padi dan menyewakan mesin pemroses padi), namun perekonomian setempat belum pulih ke tingkat sebelum krisis.

d. Mebel dan Produk Kayu (Kabupaten Jepara, Jawa Tengah)

Industri mebel dan produk kayu di Kab. Jepara merupakan eksportir mebel taman utama ke AS dan Eropa. Selama krisis keuangan di tahun 1997-1998, industri-industri tersebut telah menikmati keuntungan besar, dan hal tersebut menimbulkan kenaikan jumlah perusahaan lokal dan perusahaan asing yang bekerja untuk ekspor. Namun penurunan mutu produk dan pembalakan liar kayu jati telah mengakibatkan jatuhnya angka ekspor selama lima tahun terakhir. Selain itu, kayu juga semakin sulit ditemukan, dan peristiwa bom di Bali juga telah mengakibatkan penurunan ekspor melalui Bali. Ketika krisis global dimulai, pesanan ekspor dari AS dan Eropa menguap dengan cepat dan oleh karena itu, industri ini sangat terpukul, walaupun beberapa produsen dapat bertahan dengan beralih ke pasar Eropa Timur. Produsen mebel *indoor* untuk pasar dalam negeri dan pasar Asia tidak terkena dampak yang terlalu serius.

Sejumlah pabrik mebel asing bangkrut dan banyak buruh dirumahkan. Hal tersebut mempengaruhi kaum pria dan wanita karena kaum pria umumnya bekerja di bagian perakitan sedangkan kaum wanita bekerja di bagian *finishing*. Sebagian besar para pekerja yang dirumahkan beralih ke sektor pertanian atau perikanan, atau melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Mereka pada umumnya dulu bekerja di bidang-bidang tersebut sebelum pertumbuhan cepat di sektor mebel selama krisis tahun 1997-1998. Walaupun krisis global menyebabkan kemerosotan perekonomian lokal, dampaknya terhadap mata pencaharian setempat tidak terlalu signifikan karena masih tersedianya alternatif pekerjaan.

Selama kunjungan yang dilakukan pada bulan Desember 2009, terdapat sejumlah kenaikan pesanan ekspor, namun pesanan dari dalam negeri sebagian besar adalah untuk produk-produk berkualitas rendah dan penghasilan untuk pekerja papan bawah tidak mengalami kenaikan. Sebagian besar pekerja pria masih bekerja di industri-industri mebel namun dengan jam kerja yang lebih sedikit (turun dari enam sampai ke empat hari kerja), namun peluang kerja untuk kaum wanita semakin sedikit. Sejumlah pekerja menganggur selama 3-4 bulan di awal tahun 2010 karena perubahan persyaratan dari pembeli produk kualitas tinggi. Para pembeli kini lebih memilih untuk memesan produk-produk berkualitas lebih rendah, dengan menggunakan bahan yang murah dan melakukan *finishing* di gudang mereka. Sebelumnya, pekerjaan *finishing* biasanya dilakukan oleh pekerja wanita.

Situasi pada bulan Mei 2010 relatif tidak mengalami perubahan. Pesanan untuk mebel taman mulai naik, namun belum kembali ke tingkat sebelum krisis. Masih terdapat optimisme bahwa sektor ini masih memiliki masa depan, namun situasi untuk industri-industri produsen mebel skala besar masih tetap stagnan, walaupun sejumlah pesanan mulai masuk.

e. Industri Tekstil dan Garmen (Kabupaten Bandung, Jawa Barat)

Industri tekstil dan garmen memegang peranan besar dan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi sekitar 3,5 persen terhadap total nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2008–2009. Industri ini juga merupakan industri padat karya yang mempekerjakan lebih dari satu juta pekerja. Penilaian kualitatif dilakukan di Desa Solokan Jeruk. Sebagian besar industri garmen di desa tersebut berfungsi sebagai “penyedia jasa” dan berproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek di AS (70 persen), Eropa (27 persen), dan Afrika (sekitar 3 persen). Dampak langsung dari krisis pertama kali dirasakan pada awal tahun 2009 dengan merosotnya pesanan rata-rata sebesar 30 persen. Sepanjang tahun 2009, tidak ada perusahaan yang tutup karena semua perusahaan terus berproduksi dan melanjutkan pesanan dari tahun 2008. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh pesanan untuk tahun 2010. Dampak krisis terhadap bisnis-bisnis ini mengakibatkan menumpuknya tunggakan tagihan sewa tempat, listrik, dan telepon bagi manajemen. Produksi industri hulu seperti pemintalan masih stabil dan bahkan masih menerima pekerja baru. Para pemilik industri skala kecil dan menengah, khususnya para produsen sarung, pakaian olahraga, dan handuk menyatakan bahwa selama tahun 2008, bisnis mereka masih relatif stabil. Pesanan yang diterima oleh para produsen sarung memang meningkat, karena permintaan sarung selama bulan Ramadan dan untuk Hari Raya Idul Fitri. Situasi ini juga berlaku pada bisnis-bisnis yang memproduksi bahan *paris* dan *asahi*. Pesanan terus meningkat dan mencapai puncaknya selama pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2009.

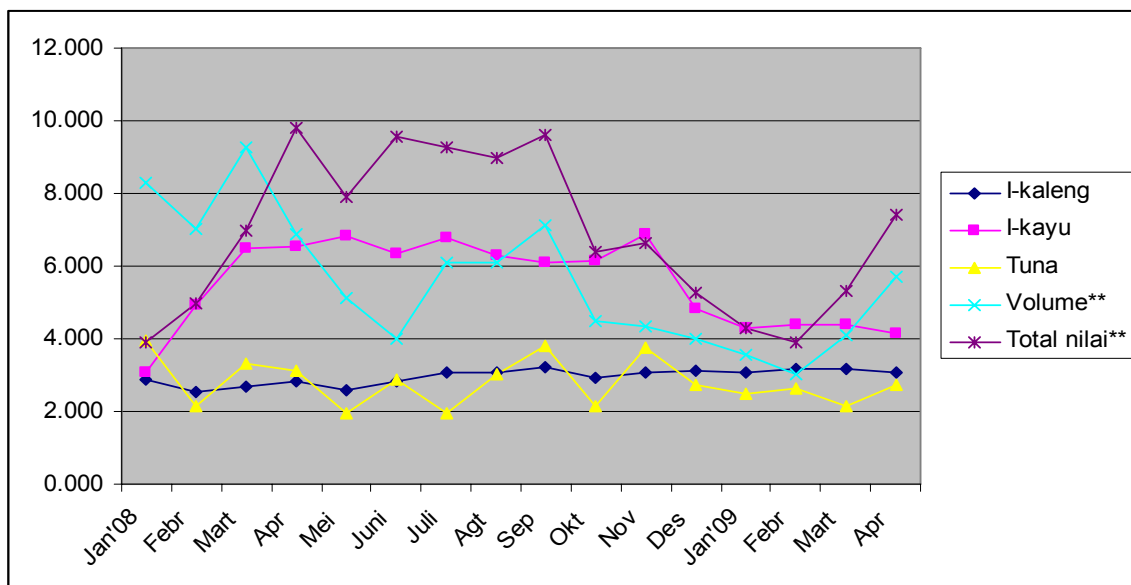
Menjelang akhir tahun 2009, beberapa pabrik tekstil merekrut pekerja baru, kebanyakan kaum wanita, dan sejumlah pabrik mulai membayarkan kembali upah lembur. Namun, kondisi kerja tidak membaik karena kebanyakan pekerja masih bekerja berdasarkan kontrak dan memiliki sedikit peluang untuk dipromosikan sebagai pekerja tetap. Sisi positifnya adalah asrama-asrama yang sebelumnya kosong, kini telah ditempati.

Pada saat dilakukan kunjungan ketiga di bulan April 2010, sejumlah pabrik telah tutup, sementara lainnya mulai merekrut pekerja, walaupun dengan pengurangan jaminan bagi para pekerja tersebut. Kontrak-kontrak mungkin diberikan untuk jangka waktu yang lebih pendek, dan walaupun upah minimum dibayarkan, tunjangan-tunjangan lainnya mungkin berkurang.

f. Industri Pengolahan Ikan (Kota Bitung, Sulawesi Utara)

Industri-industri pengolahan ikan di Kota Bitung mengalami penurunan sebesar 40 persen dalam ekspor ikan kaleng dan ikan olahan antara tahun 2007 dan 2008, terutama karena penurunan sepanjang bulan Oktober-Desember 2008. Namun, sebagian besar industri telah dapat mengalihkan tujuan pasar mereka, dari pasar yang mengalami penurunan di AS dan Jepang ke negara-negara lain termasuk negara-negara di Timur Tengah, Uni Eropa, dan Asia, termasuk Cina dan Korea Selatan. Studi lapangan tidak mendengar adanya pekerja yang dirumahkan di industri-industri tersebut, dan juga tidak ada dampak-dampak yang dilaporkan terhadap kegiatan-kegiatan pendukung perekonomian. Faktor yang dilaporkan memiliki dampak yang paling besar terhadap penurunan pasokan ikan di Bitung adalah perubahan kebijakan pemerintah yang tidak lagi mewajibkan kapal untuk kembali ke pelabuhan awal untuk membongkar muatan ikan tangkapannya; pembongkaran muatan kini dapat dilakukan di pelabuhan mana pun di dekat daerah penangkapan ikan, dan ini menyebabkan sebagian besar kapal penangkap ikan sekarang berlabuh di Maluku.

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa volume dan ekspor ikan dari Bitung telah mengalami penurunan sejak bulan Oktober 2008 dan mencapai titik terendahnya pada bulan Februari 2009, namun telah menunjukkan peningkatan kembali sejak saat itu. Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan juga menunjukkan bahwa tingkat produksi dan ekspor produk-produk ikan telah meningkat menjelang pertengahan tahun 2009.



Gambar 3.6: Volume, Nilai, dan Rata-Rata Harga Ekspor Ikan melalui pelabuhan Bitung (Volume dalam 500-an ton, nilai dalam jutaan A.S. \$, dan harga dalam A.S. \$)

Pada bulan Mei 2010, keadaan industri pengolahan ikan relatif tidak mengalami perubahan. Permintaan ekspor tetap tinggi (volume ekspor meningkat), pasar AS kembali normal, namun produksi masih berada di bawah kapasitas (sekitar 40 persen dari kapasitas normal) karena kurangnya pasokan ikan. Walaupun demikian, terdapat tanda-tanda perbaikan di bidang tersebut, seperti dibangunnya pabrik-pabrik baru, perluasan pabrik-pabrik lama, dan penambahan produk-produk baru. Semua hal tersebut menambah permintaan tenaga kerja, termasuk permintaan untuk para pekerja wanita. Para pekerja wanita biasanya bekerja di industri ini sebagai buruh harian untuk memotong dan membersihkan ikan.

g. Pekerja Migran (Kabupaten Malang Selatan, Jawa Timur)

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara sebagai akibat dari krisis global tahun 2008-2009 berpotensi mempengaruhi ketahanan kerja pekerja migran internasional, termasuk yang berasal dari Indonesia. Industri-industri yang terkena krisis berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan berbagai cara, antara lain, mengurangi jumlah pekerja dan/atau jam kerja. Muncul kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan dampak tumpahan (*spillover effect*) terhadap kehidupan penduduk yang bergantung pada penghasilan dari pekerja di luar negeri. Berdasarkan asumsi ini, SMERU menyelenggarakan penilaian kualitatif di Kabupaten Malang Selatan, yang dikenal sebagai wilayah yang mengirimkan kurang lebih sebanyak 5.000 pekerja ke luar negeri setiap tahun.

Pada bulan September 2009, 1.108 orang dari desa studi (618 perempuan dan 400 laki-laki) bekerja di negara lain, sementara 853 orang (481 perempuan dan 372 laki-laki) telah bekerja di luar negeri selama beberapa waktu. Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari desa tersebut bekerja di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia, sementara sebagian kecil lainnya bekerja di Singapura, Kuwait, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Jepang, AS, Aljazair, dan Macau. Studi menunjukkan bahwa TKI yang bekerja di negara-negara Asia-Pasifik mengalami dampak lebih buruk akibat krisis global dibandingkan mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah. Pekerja di bidang industri konstruksi dan manufaktur (otomotif dan elektronik) di Malaysia dan di industri-industri kecil dan rumah tangga (otomotif, elektronik, dan pengolahan makanan) di Taiwan dan Korea Selatan telah merasakan dampak langsung dari krisis tersebut. Krisis ini berdampak pada makin rendahnya penghasilan akibat berkurangnya jam kerja resmi dan berkurangnya atau dihapuskannya lembur. Namun demikian, sebagian besar TKI tetap tinggal dan tidak kembali ke tanah air, kecuali mereka yang menghadapi masalah hukum. Jumlah uang yang dapat mereka kirimkan turun sebesar 25-50 persen akibat berkurangnya jam kerja resmi dan berkurangnya atau bahkan dihapuskannya lembur. Namun demikian, berkurangnya jumlah uang yang diterima para anggota keluarga TKI tidak menimbulkan kesulitan besar bagi keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan utama sehari-hari mereka, seperti konsumsi dasar, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah uang yang mereka terima masih lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yang berarti bahwa mereka tidak perlu menyesuaikan gaya hidup dan pola konsumsi mereka, kecuali untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier misalnya dengan cara menghentikan pembangunan rumah untuk sementara waktu atau menunda pembelian perabot rumah tangga atau kendaraan. Terpisah dari hal itu, keluarga TKI pada umumnya mempunyai sumber penghasilan lain, misalnya dari pertanian, peternakan atau usaha setempat lainnya.

Menjelang akhir tahun 2009, kondisi kerja para TKI di sektor industri, khususnya di Korea Selatan, mulai agak pulih. Beberapa pekerja sambilan kembali ke pekerjaan mereka semula atau memperoleh pekerjaan baru di perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain. Para pekerja migran di daerah-daerah lain mengalami kenaikan pula, terutama di Kalimantan dan Sulawesi. Persaingan di antara usaha kecil semakin meningkat, seperti kios telepon genggam dan *voucher* Prabayar, yang berakibat pada berkurangnya omzet usaha. Usaha mebel juga mengalami penurunan akibat kenaikan harga bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kegiatan peternakan sapi juga berkurang dan harga domba mengalami penurunan karena makin besarnya arus daging impor. Dalam upaya mengatasi persaingan yang makin ketat tersebut, banyak penduduk setempat yang membuka jenis usaha baru, seperti menjual barang-barang yang didiversifikasi, menyewakan *sound system*, membuka toko yang menjual peralatan dan bahan untuk keperluan memasak/membuat kue.

Kunjungan ketiga yang dilakukan pada bulan Mei 2010 menunjukkan bahwa kondisi kerja para TKI di Korea Selatan terus membaik. Informasi yang dikumpulkan selama kunjungan ini menunjukkan bahwa beberapa pabrik mulai kembali beroperasi dengan jam kerja normal, bahwa kontrak-kontrak kerja diperpanjang, dan jumlah pengiriman uang ke tanah air hampir kembali ke angka normal. Akan tetapi, timbul keprihatinan terkait kebijakan antar pemerintah (*government-to-government*) dengan negara-negara lain terkait dengan para pekerja migran. Para calon TKI ke Korea Selatan diseleksi oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dengan prioritas yang diberikan kepada para calon TKI yang hingga saat ini belum dapat berangkat. Terdapat pula Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang penundaan sementara untuk mengirimkan para pekerja migran ke Malaysia (khususnya bagi mereka yang akan bekerja di sektor informal). Kondisi ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah TKI ilegal. Menurut pejabat pemerintah setempat, akan dilakukan kajian terhadap Nota Kesepahaman antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap TKI. Pengiriman TKI mungkin akan ditunda untuk sementara waktu karena kondisi ini, sementara jumlah TKI yang mendaftar untuk bekerja di negara-negara tersebut sesungguhnya tetap mengalami peningkatan. Akan dilakukan pula kajian terhadap Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Macau terkait pelaksanaan sistem pengurusan visa kerja saat kedatangan (*working-visa-on-arrival system*) yang telah menempatkan para TKI dalam kondisi yang semakin rentan. Mereka harus menunggu selama sekitar tiga bulan, dan beberapa di antaranya yang bahkan terjerumus dalam pelacuran untuk mempertahankan hidup.

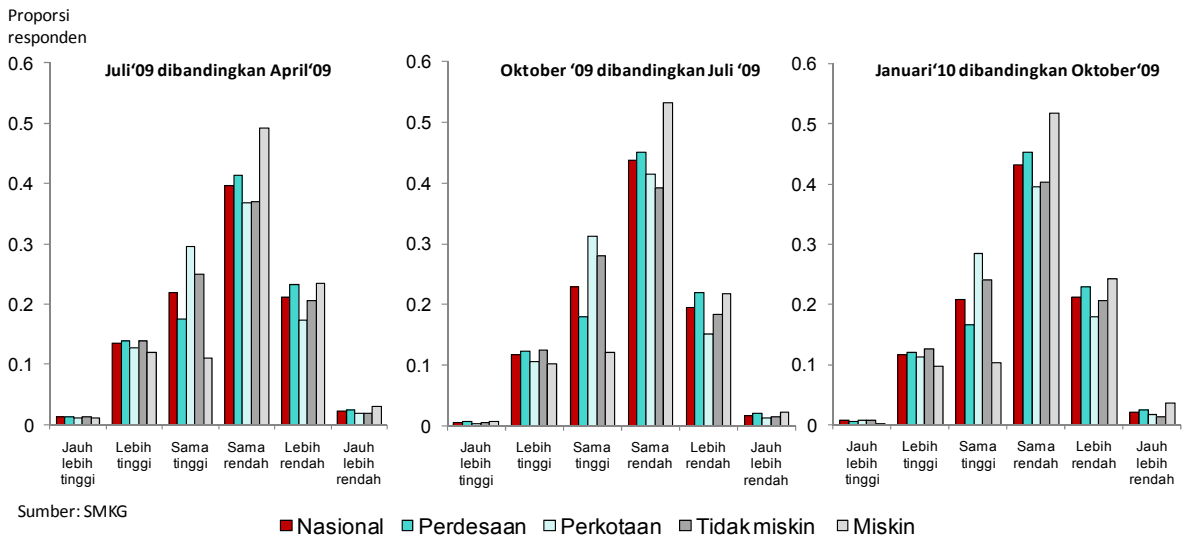
3.3 Perekonomian Rumah Tangga

Dalam menganalisis data tentang perekonomian rumah tangga, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar data tersebut mencerminkan opini-opini daripada nilai-nilai yang sesungguhnya. Dalam memberikan opini-opini, responden kemungkinan memiliki kecenderungan alamiah untuk melebih-lebihkan hilangnya penghasilan atau meningkatnya biaya konsumsi, terutama apabila mereka beranggapan bahwa subsidi pemerintah bergantung pada jawaban-jawaban yang mereka berikan.

3.3.1 Berkurangnya Penghasilan Rumah Tangga

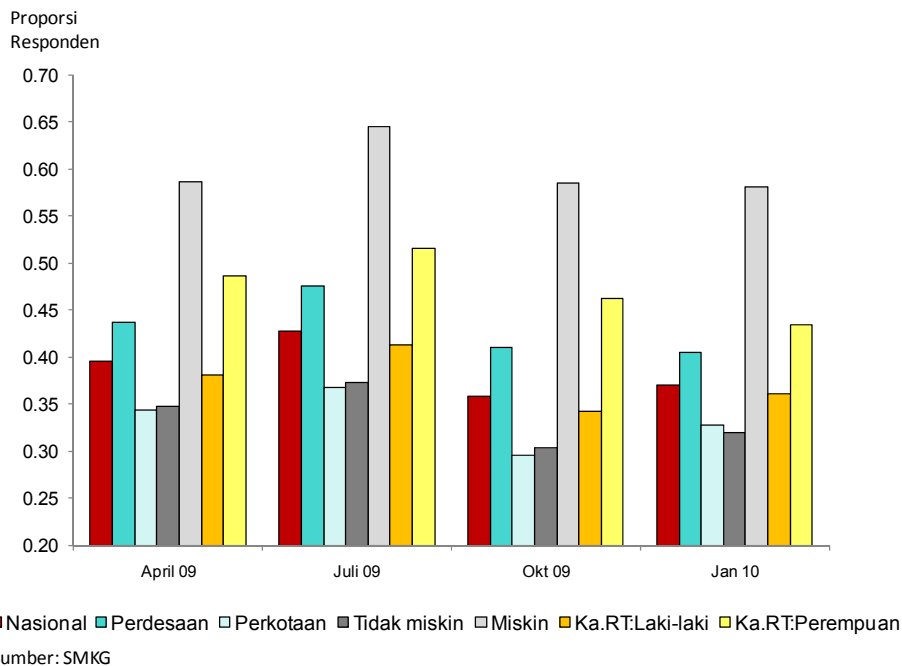
Responden-responden rumah tangga diminta untuk membandingkan antara penghasilan rumah tangga mereka saat ini dan penghasilan mereka tiga bulan lalu dengan skala enam poin (*six-point scale*) mulai dari “sangat tinggi” hingga “sangat rendah”. Data survei putaran pertama, yang menyajikan perbandingan pada bulan April-Juli 2009³ cenderung menunjukkan skala “sangat rendah”, yang menunjukkan bahwa Kepala Rumah Tangga merasakan berkurangnya penghasilan rumah tangga, khususnya di daerah perdesaan dan untuk rumah tangga miskin. Perspektif ini sesuai dengan berkurangnya jam kerja yang dilaporkan selama periode tersebut. Data yang diperoleh dari survei putaran kedua dan ketiga tidak menunjukkan adanya perbaikan.

³ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan waktu untuk indikator-indikator yang berbeda, yaitu indikator pasar tenaga kerja adalah untuk minggu pertama bulan Mei/Agustus/November/Februari, sementara sebagian besar indikator lainnya adalah untuk bulan April/Juli/Oktober/Januari.



Gambar 3.7: Perbandingan persepsi pendapatan rumah tangga triwulanan, Apr-Jul 2009, Jul-Okt 2009, dan Okt 2009 - Jan 2010

3.3.2 Kesulitan untuk Memenuhi Biaya Hidup Sehari-Hari



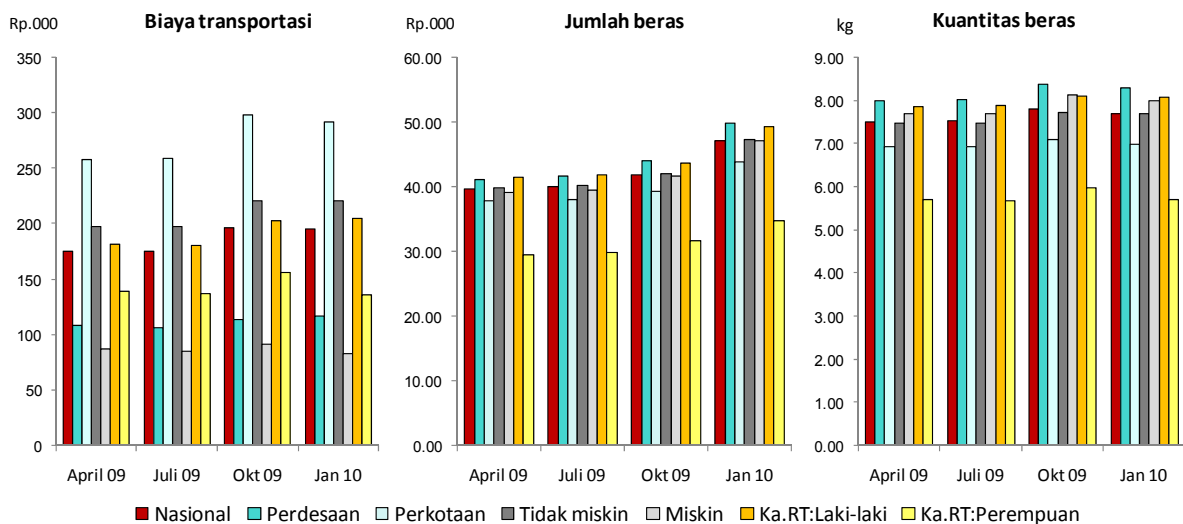
Gambar 3.8: Rumah tangga-rumah tangga yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

Responden rumah tangga ditanyakan apakah mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (“ya” atau “tidak”). Jumlah rumah tangga yang dilaporkan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi meningkat selama periode bulan April sampai dengan Juli 2009. Hal ini terjadi seiring dengan kenaikan harga makanan dan turunnya jumlah jam kerja pada periode yang sama. Peningkatan tersebut tidak tampak pada periode Juli sampai dengan Oktober seiring dengan membaiknya keadaan. Semua kategori rumah tangga mengalami dampak kenaikan harga pada bulan April hingga Juli, dengan jumlah rumah tangga miskin yang mengalami kesulitan lebih besar dibandingkan jumlah

rumah tangga non-miskin yang mengalami kesulitan. Namun demikian, hanya bagian yang mengalami peningkatan terkait dengan berkurangnya jam kerja yang kemungkinan berkaitan dengan krisis.

Dengan makanan yang merupakan dua pertiga dari keranjang kemiskinan, inflasi harga makanan yang tidak terkait dengan krisis akan menjadi penyebab yang signifikan pula.

3.3.3 Biaya Transportasi dan Makanan



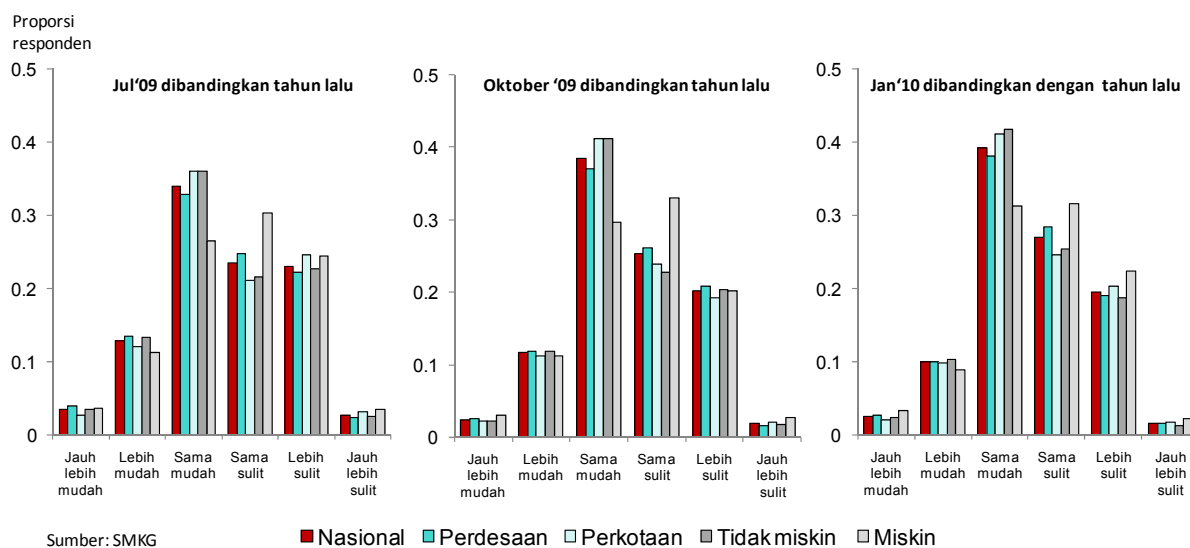
Sumber: SMKG

Gambar 3.9: Biaya transportasi, pengeluaran untuk beras, dan volume beras

Responden rumah tangga diminta berapa biaya transportasi yang sesungguhnya dan volume serta pengeluaran untuk beras yang dikonsumsi selama periode satu minggu. Biaya transportasi yang dilaporkan sebagian besar tetap sama antara bulan April dan Juli 2009, tetapi terjadi kenaikan selama triwulan Juli sampai dengan Oktober 2009, khususnya di daerah perdesaan, yang kemungkinan berkaitan dengan masa liburan Idul Fitri, diikuti oleh sedikit penurunan pada periode Oktober 2009 – Januari 2010.

Pada dasarnya, volume beras tetap sama, tetapi pengeluaran untuk beras naik seiring dengan kenaikan harga beras.

3.3.4 Biaya Pendidikan



Gambar 3.10: Keterjangkauan pendidikan

Untuk keterjangkauan pendidikan, secara nasional 53 persen dari para responden melaporkan bahwa pendidikan jauh lebih mudah, lebih mudah atau agak lebih mudah dengan biaya tertentu pada bulan Oktober dibandingkan dengan bulan Oktober tahun sebelumnya. Pada bulan Januari 2010, secara nasional 52 persen responden melaporkan bahwa upaya pemenuhan biaya pendidikan agak sulit, sulit atau sangat sulit dibandingkan dengan bulan Januari 2009.

3.3.5 Temuan tentang Dampak Terhadap Perekonomian Rumah Tangga dari Pemantauan Krisis secara Kualitatif

a. Industri Elektronik dan Otomotif (Kabupaten Bekasi, Jawa Barat)

Di Desa Gandasari, industri elektronik dan otomotif tidak hanya membuka peluang kerja bagi penduduk setempat dan pekerja migran, melainkan juga menciptakan permintaan akan akomodasi tempat tinggal, serta kios yang menjual kebutuhan sehari-hari (makanan, kios telepon genggam). Ketika pada awal tahun 2009, industri-industri tersebut memangkas kegiatan operasionalnya secara besar-besaran, rumah-rumah kos mengalami kekosongan dan omzet kios-kios makanan dan kios-kios lain mengalami penurunan. Situasi ini membaik pada paruh kedua tahun 2009 dan pada awal tahun 2010, ketika rumah-rumah kos hampir seluruhnya dihuni kembali dan bahkan beberapa di antaranya sedang dibangun.

b. Perkebunan Karet (Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)

Di perkebunan karet di Kab. Banjar, dampak krisis dirasakan dalam dua hal. Pertama, anjloknya harga karet *lump* (dari Rp11.200 pada bulan September 2008 menjadi Rp2.500 pada bulan Oktober 2008), mengakibatkan berkurangnya penghasilan secara besar-besaran, khususnya bagi petani karet skala kecil, pemilik lahan, dan pedagang karet skala menengah. Harga telah mengalami peningkatan secara bertahap (Rp3.750 pada bulan Januari 2009, Rp6.000 pada bulan November 2009, dan Rp9.000 pada bulan Februari 2010). Kedua, terjadi kenaikan harga komoditas harian serta untuk bahan pertanian, yang mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk.

Dampak sekunder dari krisis tersebut, akibat hilangnya penghasilan oleh petani dan pedagang perantara, adalah berkurangnya penghasilan kelompok-kelompok tertentu, seperti tukang ojek, yang penghasilannya turun dari Rp50.000 per hari menjadi Rp20.000 per hari, sebagian karena petani karet memutuskan untuk mengangkut karet sendiri daripada menggunakan jasa tukang ojek untuk mengangkutnya. Banyak petani yang telah membeli sepeda motor juga gagal membayar cicilan mereka dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada dealer. Bahkan kelompok-kelompok arisan memutuskan untuk mengurangi frekuensi pertemuan mereka (dari satu minggu sekali menjadi dua minggu sekali atau setiap bulan).

Kenaikan harga karet pada tahun 2009 dan 2010 berdampak pada kembalinya pekerja ke perkebunan karet, meningkatnya penggunaan pupuk, dan bertambahnya kembali jadwal pertemuan arisan.

c. Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten Kampar, Riau)

Perkebunan kelapa sawit di Kab. Kampar memiliki pengalaman serupa. Anjloknya harga TBS selama paruh kedua tahun 2008 menyebabkan hilangnya sebagian besar penghasilan petani skala kecil, pekerja perkebunan, dan industri pengolahan kelapa sawit. Banyak petani mengurangi pula penggunaan pupuk dan mengembalikan sepeda motor yang telah mereka beli secara kredit kepada dealer-dealer, sementara lainnya mengalami wanprestasi atas pinjaman modal kerja mereka. Sebelum krisis, kaum perempuan dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan mengumpulkan brondol (buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon), tetapi program revitalisasi perkebunan oleh PTPN telah menyebabkan berkurangnya peluang tersebut.

Pada akhir tahun 2009, harga TBS, walaupun masih berfluktuasi, mulai mendekati tingkat harga pada pertengahan tahun 2008 dan intervensi pemerintah juga telah menyebabkan turunnya harga pupuk (dari Rp350.000-400.000 untuk 50 kg urea pada bulan Juli 2009, menjadi Rp160.000-180.000 pada bulan November), sehingga banyak petani mulai menggunakan pupuk kembali.

Namun demikian, proses pemulihan tersebut tidak berlanjut seperti yang diharapkan. Pada bulan April 2010, dengan harga TBS yang saat ini mencapai Rp1.150/kg, angka produksi mencapai titik yang sangat rendah akibat kemarau berkepanjangan selama 6-7 bulan terakhir dan pengurangan penggunaan pupuk selama masa krisis. Petani skala kecil saat ini hanya memproduksi 20 persen dari jumlah yang sebelumnya mereka produksi (penurunan sekitar satu ton setiap dua hektar pada bulan Juli 2009 sampai sekitar 200-300 kg per dua hektar pada bulan April 2010). Kemarau juga telah mengakibatkan berkurangnya frekuensi panen, yaitu dari setiap dua minggu menjadi setiap 20 hari.

d. Kerajinan Gerabah (Kabupaten Lombok Barat, NTB)

Kerajinan gerabah di Desa Banyumulek terkena pula dampak krisis global akibat berkurangnya permintaan produk tersebut dari Eropa dan AS. Kunjungan lapangan pada bulan Juli 2009 menunjukkan bahwa mayoritas para perajin gerabah belum menerima pesanan antara bulan Januari-Maret 2009. Turunnya permintaan tersebut bertambah dengan naiknya harga bahan baku, yang meningkat hampir dua kali lipat selama setahun terakhir.

e. Industri Pengolahan Ikan (Kota Bitung, Sulawesi Utara)

Industri penangkapan ikan skala besar di Kota Bitung menghadapi situasi yang agak optimistis, tetapi kehidupan para nelayan tradisional skala kecil menjadi semakin sulit. Penghasilan mereka mengalami kemerosotan sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan yang milik asing sejak sekitar tahun 1995. Selain itu, dengan meningkatnya harga bahan bakar dan berkurangnya pasokan minyak guna mengurangi subsidi bahan bakar minyak, banyak pemilik pajeko (perahu penangkap ikan tradisional) yang tidak mampu lagi mengoperasikan perahu-perahu mereka akibat tingginya harga minyak tanah dan kelangkaan minyak tanah di pasar.

Situasi pada akhir tahun 2009 dilaporkan pada umumnya sama. Kelangkaan ikan masih berlangsung dan nelayan-nelayan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sebagian besar akibat lonjakan harga bahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Penghasilan cenderung turun akibat hasil tangkapan yang buruk, cuaca di penghujung tahun memburuk, dan harga bahan bakar minyak serta harga komoditas pokok naik. Banyak nelayan yang terbelit utang. Pada bulan Mei 2010, tidak terjadi perbaikan situasi.

f. Perkebunan Kelapa (Kota Bitung, Sulawesi Utara)

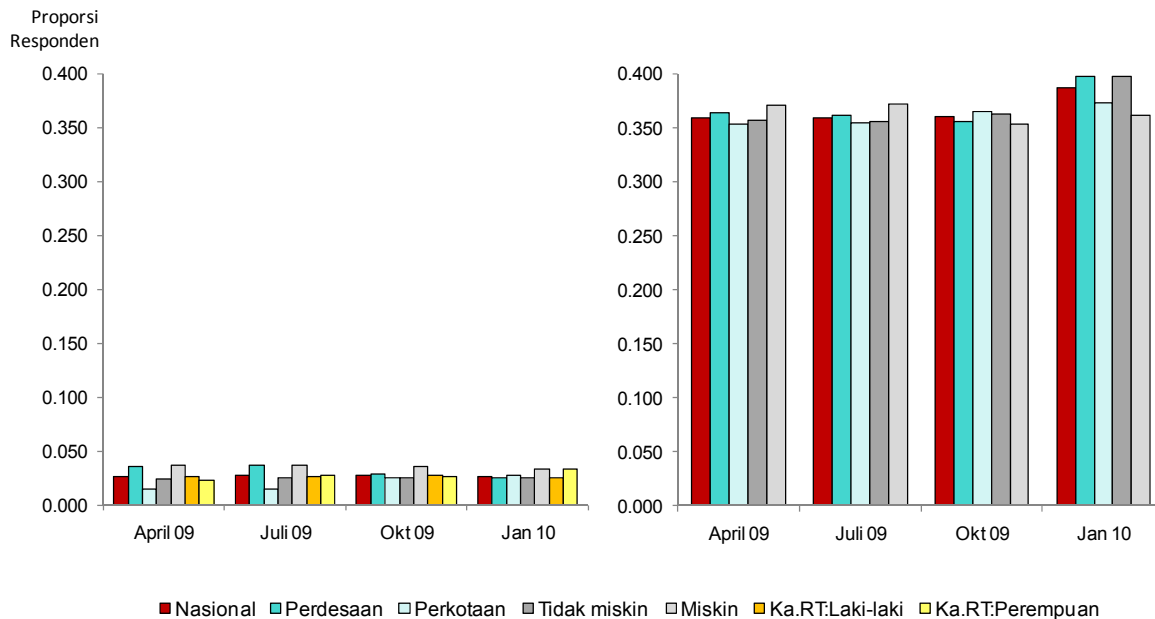
Pemantauan berita menunjukkan bahwa perkebunan kelapa di bagian timur Indonesia terkena pula dampak krisis global. Data pada bulan November 2009 menunjukkan bahwa permintaan minyak kelapa dari pasar AS dan Eropa mengalami penurunan, menyusul jatuhnya harga dunia untuk minyak kelapa. Hal ini menyebabkan jatuhnya harga kopra dan produk-produk lain dari kopra (arang dan tempurung kelapa) di pasar dalam negeri. Pada bulan Desember 2009, petani kopra menerima harga penjualan kopra sekitar Rp. 3.400/kg, sementara pada bulan Agustus 2008, harga kopra mencapai sekitar Rp. 5.000-7.000 per kg. Selain itu, produksi kopra mengalami penurunan akibat cuaca panas, hama penggerek tanaman, makin sedikit dan makin kecilnya ukuran kelapa, serta kelangkaan pupuk. Keadaan ini telah menyebabkan berkurangnya penghasilan petani kopra, sementara harga kebutuhan pokok meningkat.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, banyak petani kopra yang menyewakan lahan mereka atau memangkas dan menjual pohon kelapa mereka untuk memenuhi permintaan akan bahan baku bangunan. Pohon-pohon dijual dengan harga sekitar Rp150.000 per batang. Terjadi pula perubahan fungsi lahan dari perkebunan kelapa produktif menjadi lahan perumahan. Selama masa krisis, sebagian petani kopra juga beralih profesi dan menjadi tukang ojek serta melakukan pekerjaan sambilan.

Menjelang bulan Mei 2010, harga kopra mengalami kenaikan hingga Rp. 4.000-4.500 per kg. Permintaan dunia akan minyak kelapa mulai stabil dan terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dilakukan perluasan pabrik minyak kelapa dan penambahan tenaga kerja. Namun demikian, petani kopra hanya menerima sedikit manfaat dari kondisi yang membaik tersebut. Walaupun harga kopra naik, produksi kopra cenderung turun. Masalahnya terletak pada kondisi pohon kelapa yaitu, banyak di antara pohon kelapa telah tua dengan kapasitas produksi yang semakin berkurang, tidak dilakukan revitalisasi perkebunan, dan musim kering yang panjang pada awal tahun 2010 yang selanjutnya mengurangi produktivitas. Banyak pohon kelapa yang ditebang dan dijual untuk digunakan sebagai bahan baku bangunan dan semakin sedikit orang yang bekerja di perkebunan kelapa.

3.4 Strategi-Strategi Penanggulangan Krisis

3.4.1 Penanggulangan Krisis dengan Mencari Pekerjaan



Gambar 3.11: Partisipasi anak dan perempuan dalam angkatan kerja

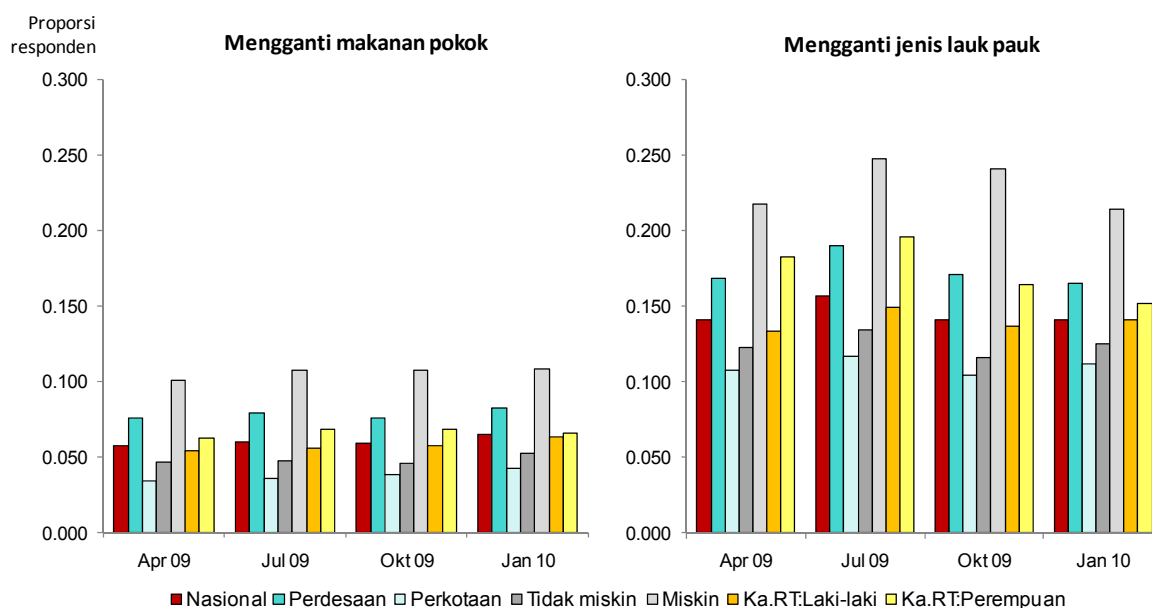
Selama putaran pertama survei SMKG, proporsi rumah tangga dengan pekerja anak hanya mencapai kurang dari 3 persen, yang berarti bahwa persentase di daerah perdesaan lebih dari dua kali lipat persentase di daerah perkotaan. Jumlah pekerja anak di setiap rumah tangga mencapai 1,3 untuk rumah tangga tersebut, yang menunjukkan bahwa 70 persen atau lebih dari rumah tangga tersebut hanya memiliki satu anak yang bekerja.

Pada tahun 2009 proporsi rumah tangga dengan satu perempuan atau lebih yang berpartisipasi dalam angkatan kerja (tidak termasuk kepala rumah tangga) mencapai sekitar 36 persen, dengan sedikit perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan, miskin dan non-miskin. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak sepenuhnya dapat ditafsirkan secara sederhana. Dalam jangka panjang, kenaikan partisipasi angkatan kerja perempuan boleh jadi merupakan hasil yang diharapkan. Namun demikian, keikutsertaan jangka pendek yang tidak terencana, misalnya akibat penghasilan rumah tangga yang di luar perkiraan rendah, dapat menimbulkan dampak yang merugikan apabila diikuti oleh berkurangnya perawatan anak-anak yang tidak terencana.

Dalam putaran pertama survei, sekitar 5 persen rumah tangga menunjukkan adanya migrasi ke luar daerah selama triwulan tersebut, dengan persentase dari rumah tangga perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan. Sekitar 1 persen menunjukkan migrasi ke dalam, dengan persentase yang kurang lebih sama antara rumah tangga di perdesaan dan perkotaan.

Singkatnya, tidak terdapat bukti adanya peningkatan upaya untuk mencari pekerjaan, baik oleh pekerja anak maupun perempuan dengan memasuki angkatan kerja.

3.4.2 Penganggulan Krisis dengan Mengurangi Biaya Konsumsi



Sumber: SMKG

Gambar 3.12: Substitusi makanan oleh rumah tangga-rumah tangga yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi

Pengamatan berikut ini terbatas pada rumah tangga-rumah tangga yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Pada bulan Mei 2009, kurang dari 6 persen dari rumah tangga-rumah tangga tersebut mengganti makanan pokok mereka (biasanya beras) dengan makanan yang berkualitas atau berharga lebih rendah, dan hal tersebut adalah dua kali lipat untuk rumah tangga di perdesaan dibandingkan dengan rumah tangga di perkotaan. Situasi tersebut pada dasarnya tetap tidak berubah dalam tiga triwulan berikutnya. Hal ini sangat sesuai dengan volume beras yang tidak berubah (lihat Gambar 3.9).

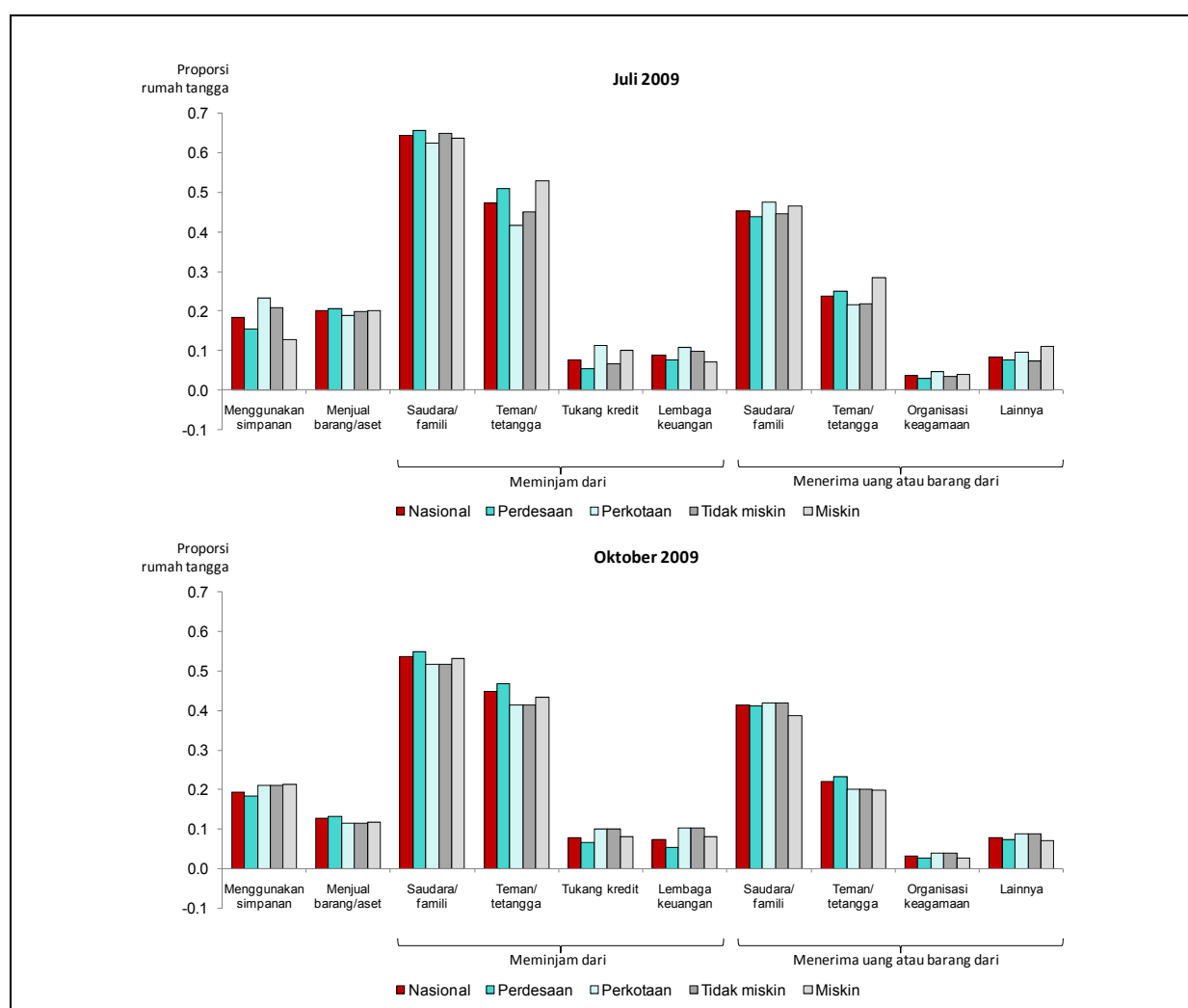
Di sisi lain, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.12, proporsi rumah tangga yang menggantikan lauk pauk mereka dengan lauk pauk yang berkualitas atau berharga lebih rendah, naik dari 14 persen pada bulan April 2009 menjadi 16 persen pada bulan Juli 2009. Penggantian ini seiring dengan berkurangnya jam kerja, meningkatnya harga makanan, dan semakin sulitnya menjangkau kebutuhan konsumsi sehari-hari selama periode yang sama. Terkait dengan makanan pokok, penggantian lauk pauk lebih umum dilakukan dalam rumah tangga di perdesaan dibandingkan dengan rumah tangga di perkotaan, dan dengan kenaikan untuk rumah tangga miskin yang mencapai sebesar 3 persen. Kenaikan ini berbalik pada triwulan berikutnya, dengan angka penggantian lauk pauk kembali ke angka pada bulan Mei dan hal ini diikuti oleh sedikit kenaikan pada bulan Januari 2010.

Secara singkat, data selama tiga putaran survei membuktikan bahwa rumah tangga-rumah tangga melakukan upaya pengurangan biaya makan dengan cara mengganti lauk pauk mereka dengan makanan yang berharga atau berkualitas lebih rendah sebagai suatu strategi penanggulangan krisis.

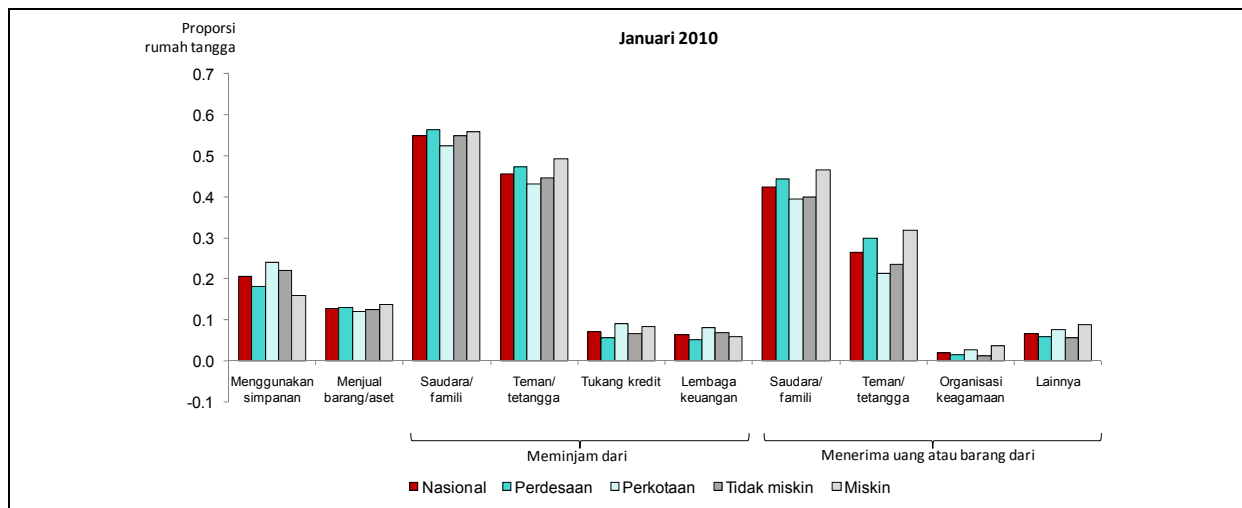
3.4.3 Penanggulangan Krisis melalui Pembiayaan

Data tentang pembiayaan kebutuhan konsumsi memiliki tiga pembatasan. Pertama, data tersebut dilaporkan oleh responden-responden sendiri. Kedua, untuk survei putaran pertama, data tersebut hanya mengacu pada subset rumah tangga yang menyatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. (Dalam survei putaran kedua dan ketiga, pertanyaan tersebut dilontarkan kepada semua responden). Ketiga, data tersebut mengacu pada **penggunaan** berbagai mekanisme pembiayaan, bukan **nilai** transaksi yang berkaitan. Dengan demikian, mekanisme penanggulangan utama **menurut nilai** tidak dapat ditentukan dari data tersebut⁴.

Pengamatan berikut ini hanya mengacu pada rumah tangga-rumah tangga yang menyatakan kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari, yang disebut “rumah tangga yang berjuang”.



⁴ Hal ini berlaku untuk sebagian besar indikator selain pasar tenaga kerja di mana data yang tersedia berasal dari Sakernas.



Gambar. 3.12: Mekanisme Pembiayaan Kehidupan Rumah Tangga dalam Menghadapi Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi (Juli 2009, Oktober 2009, Januari 2010)

Pada bulan Juli 2009, sekitar 20 persen dari rumah tangga-rumah tangga yang berjuang menggunakan tabungan untuk memenuhi pengeluaran untuk hidup (angka tersebut secara signifikan lebih rendah untuk penduduk miskin, kemungkinan karena lebih sedikit dari mereka yang memiliki tabungan). Proporsi rumah tangga yang sama menjual aset mereka untuk alasan yang sama seperti di atas. Rumah tangga-rumah tangga di perkotaan dan perdesaan yang berjuang baik pada bulan April maupun Juli secara signifikan kurang memanfaatkan tabungan dan secara signifikan menjual lebih banyak properti dan aset pada bulan Juli dibandingkan pada bulan April. Penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa tabungan mereka telah terkuras.

Selama periode bulan April sampai dengan Juli, proporsi rumah tangga di perdesaan yang berjuang pada kedua periode tersebut yang mencari pinjaman dari sanak saudara dan keluarga meningkat secara signifikan. Pada bulan Juli, jumlah pinjaman dari para pemberi pinjaman non-lembaga mencapai sekitar 8 persen secara nasional, dua kali lipat dari biasanya di antara rumah tangga-rumah tangga di perkotaan dibandingkan dengan rumah tangga-rumah tangga di perdesaan. Terdapat sedikit kenaikan dalam bentuk pinjaman mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2009.

Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan juga mencapai sekitar 8 persen secara nasional pada bulan Juli dan dua kali lipat dari biasanya di antara rumah-rumah tangga yang berjuang di perkotaan dibandingkan dengan rumah tangga-rumah tangga di perdesaan, dengan kenaikan signifikan dalam rumah tangga-rumah tangga di perdesaan sebesar lebih dari seperempat.

Proporsi rumah tangga yang berjuang yang menerima bantuan dalam bentuk uang atau barang dari sanak saudara mencapai sekitar 45 persen dan meningkat secara signifikan selama periode bulan April sampai dengan Juli baik di antara rumah tangga-rumah tangga di perdesaan maupun di perkotaan, sementara proporsi rumah tangga yang menerima bantuan dari para sahabat dan tetangga mencapai sekitar 25 persen atau turun secara signifikan.

Proporsi rumah tangga yang menerima bantuan dari organisasi-organisasi keagamaan atau sosial atau organisasi-organisasi lainnya mencapai sekitar 12 persen dan tidak berubah secara

signifikan baik di daerah perkotaan maupun di daerah perkotaan sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2009.

Secara singkat, pada pertengahan tahun 2009, jumlah rumah tangga yang mencari pinjaman menurut rumah tangga-rumah tangga yang mengalami kesulitan, meningkat, sementara pemanfaatan mekanisme keuangan lainnya tetap tidak berubah.

3.4.4 Temuan terkait Strategi Keluarga Menanggulangi Krisis dari Pemantauan Kualitatif

Di **perkebunan kepala sawit** di Kab. Kampar, dilaporkan bahwa beberapa siswa sekolah menengah atas terpaksa harus keluar dari sekolah karena orang tua mereka tidak mampu untuk memenuhi biaya transportasi mereka. Pada tahun 2009, terjadi beberapa perbaikan, tetapi daerah yang terkena dampak kemarau berkepanjangan pada awal tahun 2010 dan beberapa petani yang telah menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menanggulangi krisis yang terjadi pada tahun 2008-2009, kurang mampu bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Beberapa petani telah menjual tanah mereka dan beberapa lainnya tidak memiliki tabungan lagi.

Hal ini berdampak pula pada koperasi-koperasi setempat. Pada awal krisis, koperasi-koperasi masih mampu beroperasi dan mencairkan pinjaman, tetapi penjadwalan ulang atas pembayaran pinjaman tersebut terpaksa dilakukan guna memudahkan pemenuhan kewajiban pelunasan pinjaman. Pada akhir tahun 2009, angka pelunasan hampir kembali ke angka normal dan pinjaman-pinjaman baru dicairkan, tetapi angka tersebut turun lagi menjelang akhir triwulan pertama tahun 2010, pada saat tunggakan pelunasan pinjaman naik dan tidak ada pinjaman baru yang dicairkan. Bahkan para pedagang perantara yang seringkali meminjamkan uang kepada para petani dan pemilik tanah, tidak dapat lagi memberikan pinjaman karena penghasilan mereka dari perdagangan juga anjlok.

4. Menuju Pembentukan Suatu Sistem Pemantauan dan Respon Jangka Panjang

Dampak krisis sebagaimana dianalisa di atas dapat disebabkan oleh fluktuasi dan guncangan ekonomi maupun bencana alam. Kejadian seperti ini dirasakan terus berulang dan dalam frekuensi yang semakin meningkat. Akan tetapi dengan semakin baiknya persiapan dari suatu negara untuk menghadapi kejadian tersebut, akan semakin ringan dampak yang terjadi pada tingkat ekonomi dan pada tingkat rumah tangga. Meskipun krisis terjadi disertai dengan tanda-tanda awal, namun krisis atau guncangan ekonomi bisa juga berkembang secara cepat tanpa tanda seperti itu. Apapun penyebab dan sifat dari suatu krisis, semakin cepat dapat dideteksi, semakin cepat Pemerintah dapat mengambil tindakan penanggulangan yang ditargetkan pada daerah atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak, atau yang rentan terhadap dampak krisis. Respon cepat seperti itu – dengan kegiatan pengamanan sosial lainnya – dapat membantu melindungi kelompok-kelompok yang rentan dari dampak yang paling buruk dan membangun suatu landasan untuk pemulihan yang lebih cepat.

Pengalaman melalui pemantauan krisis yang dilakukan di tahun 2009-2010 ini telah menunjukkan bahwa – meskipun dengan sampel relatif kecil (30 rumah tangga per kabupaten/kota), dengan beberapa penilaian kualitatif yang mendalam – kita dapat memiliki gambaran bagaimana krisis memiliki dampak terhadap rumah tangga, dan mekanisme penanggulangan yang dipraktekkan oleh rumah tangga untuk menangani dampak krisis tersebut. Pengalaman pemantauan kuantitatif dan kualitatif ini memberikan masukan yang berharga untuk membangun suatu sistem pemantauan dan respon jangka panjang.

Sistem pemantauan seperti itu dapat memiliki fokus dampak krisis serupa dengan sistem yang diujicobakan di 2009-2010, tetapi dapat juga dengan fokus yang lebih luas, misalnya untuk memantau kerentanan rumah tangga dan daerah terhadap guncangan, atau untuk memantau kondisi kemiskinan. Kelebihan dari suatu sistem yang memiliki fokus yang lebih luas adalah bahwa, pada waktu tidak ada krisis, sistem pemantauan dan respon dapat memberikan informasi yang berharga dari suatu kebijakan Pemerintah yang penting, sehingga dengan demikian sistem yang telah dibangun mempunyai tujuan dan kegunaan yang lebih besar.

Indonesia merupakan negara yang sudah memiliki banyak data kuantitatif yang berharga yang dapat digunakan untuk suatu sistem pemantauan dan respon jangka panjang. Ada survei Sakernas dan Susenas dari BPS, tetapi ada pula data yang dikumpulkan oleh Kementerian/Lembaga, serta survei berkala yang dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi internasional. Pemerintah daerah juga merupakan sumber penting untuk data, serta sekaligus pengguna potensial dari informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem pemantauan dan respon. Tantangannya kemudian mengelola dan memanfaatkan data dari berbagai sumber tersebut ke dalam sistem pemantauan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang koheren dan berguna untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program. Pengembangan sistem semacam ini akan dapat menghindari suatu negara menjadi negara dengan sistem "kaya data tapi miskin informasi".

Pembentukan sistem pemantauan dan respon jangka panjang tidak bisa menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang tunggal; pembentukan sistem seperti itu memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Membangun sistem seperti itu juga tidak akan terjadi dalam waktu singkat, melainkan akan membutuhkan pengembangan atau penyesuaian sistem untuk pengumpulan data, analisis data dan diseminasi serta penggunaan informasi yang dihasilkan. Di samping itu, juga akan diperlukan pengembangan kapasitas dari orang-orang yang ditugaskan untuk mengoperasikan sistem pemantauan dan respon.

Jika pada prinsipnya ada dukungan pemerintah untuk pembentukan suatu sistem pemantauan dan respon jangka panjang, ada beberapa keputusan penting yang perlu diambil. Di mana sistem itu akan ditempatkan (yakni instansi pemerintah yang mana akan menangani koordinasi sehari-hari?) Dapatkah beberapa staf permanen ditugaskan, untuk memastikan kesinambungan dan operasi yang efektif dari sistem? Bagaimana sistem akan didukung dari segi pembiayaan? Pendanaan oleh lembaga-lembaga donor mungkin dapat membiayai bantuan teknis pada fase awal pengembangan sistem, tetapi aktivitas-aktivitas inti dari sistem pemantauan dan respon akan perlu dibiayai oleh pemerintah.

5. Kesimpulan

Kombinasi informasi pemantauan krisis secara kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman yang jauh lebih kaya dan melengkapi tentang bagaimana sebuah krisis menimbulkan dampak pada wilayah dan masyarakat serta mekanisme penularan/transmisi dampak tersebut. Pemantauan kuantitatif mempermudah kita memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang dampak krisis terhadap wilayah-wilayah yang berbeda dan perubahannya seiring dengan berjalannya waktu. Pemantauan kualitatif memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor yang berbeda dapat memperumit situasi krisis yang berkembang dan memahami bagaimana cara rumah tangga dan masyarakat menyesuaikan dan melakukan penanggulangan (*coping mechanism*) sesuai kemampuan mereka.

Meskipun dari hasil pemantauan krisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengatasi krisis ekonomi/keuangan global tahun 2008-2009 ditemukan bahwa dampak krisis tidak seintensif yang diperkirakan pada tahap awal, secara umum temuan-temuan dari analisa kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa terdapat konsistensi dan tidak banyak bertentangan. Perlu diakui bahwa informasi dari pemantauan kuantitatif dapat memberikan gambaran dampak dari perspektif nasional, provinsi, dan secara terbatas pada tingkat kabupaten/kota, namun pada tingkat yang lebih kecil – kecamatan, gambarannya diperoleh dari informasi (studi) kualitatif yang diberikan oleh pendapat dan perspektif lokal, misalnya dari tingkat desa atau masyarakat.

Pengalaman yang diperoleh dari survei cepat pemantauan krisis secara kuantitatif dan kualitatif pada tahun 2009-2010 menunjukkan bahwa untuk memantau dampak krisis yang bertujuan untuk memberikan informasi guna mendukung penyusunan kebijakan mekanisme tanggap krisis (*respon*) akan memberikan gambaran dan indikator yang lebih baik apabila pemantauan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif tersebut disusun secara terpadu di dalam suatu sistem yang diterapkan secara kontinyu.

Daftar Pustaka

- BPS (2008). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Oktober. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Marsland, N., I. Wilson, S. Abeyasekera and U. Kleih. (2000). *A methodological framework for combining Quantitative and Qualitative survey methods*. Natural Resources Institute, University of Greenwich and Statistical Services Centre, University of Reading, UK
<http://www.reading.ac.uk/ssc/publications/guides/qqa.pdf>
- World Bank (2008). *Indonesia Quarterly Economic Update: Battening Down the Hatches*. Indonesia Economic Briefing Note. World Bank, Jakarta.
<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Country-Update/ecsos.update.dec.2008.eng.pdf>
- World Bank (2010). *Crisis Monitoring and Response System (CMRS): Detailed Report*. Poverty Team, World Bank, Jakarta
- World Bank (2010). *Crisis Monitoring and Response System (CMRS): Summary Report*. Poverty Team, World Bank, Jakarta
- World Bank (2010). *Preparing for the Next Crisis: Establishing a Vulnerability and Shock Monitoring and Response System in Indonesia*. Poverty Team, World Bank, Jakarta